PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

SKRIPSI

OLEH:

BEFIRIANA MONIZA
NIM. 0502162138

Program Studi
AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN

Sumatera Utara

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Befiriana Moniza**
Nim	:	0502162138
Tempat/Tanggal Lahir	:	Medan, 30 April 1999
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Alamat	:	Jalan Purwosari Gg Sederhana No 45 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 23 Desember 2020
Yang membuat pernyataan

Befiriana Moniza

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Oleh:

Befiriana Moniza
Nim. 0502162138

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah

Medan, 23 Desember 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A	**Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**
NIDN. 2001077903	**NIDN. 0105018901**

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah

Hendra Harmain, SE, M.Pd
NIDN. 2010057302

Skripsi berjudul **"PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN"** an. Befiriana Moniza, NIM 0502162138 Prodi Akuntansi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 19 Januari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Prodi Akuntansi Syariah.

Medan, 19 Januari 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A	**Kusmilawaty, SE,Ak, M.Ak**
NIDN. 2001077903	**NIDN. 2014068001**

Anggota

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A	**Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**
NIDN. 2001077903	**NIDN. 0105018901**

Penguji I	Penguji II
Dr. Saparuddin Siregar, SE, Ak, M.Ag	**Nurwani, M.Si**
NIDN. 2018076301	**NIDN. 0126038901**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Befiriana Moniza, NIM 0502162138. ”Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan”. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Yenni Samri J Nst, S.HI, M.A sebagai Pembimbing Skripsi I dan Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I sebagai Pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan secara parsial dan simultan Pada Pemerintah Kota Medan. Populasi pada penelitian ini yaitu pegawai di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Teknik sampel yang digunakan yaitu metode sampel *Sampling Jenuh.* Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dimana Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Efisiensi sebagai variabel independen dan Transparansi Laporan Keuangan sebagai variabel dependen dengan menggunakan *software* SPSS versi 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel penyajian laporan keuangan mempunyai tingkat signifikan 0,000 < 0,05 dan t_{hitung} sebesar 4,738 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,01290 atau dapat dikatakan variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan, variabel aksesibilitas mempunyai tingkat signifikan 0,127 > 0,05 dan t_{hitung} sebesar -1,553 lebih kecil dibandingkan t_{tabel} sebesar 2,01290 atau dapat dikatakan variabel aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan, dan variabel pengendalian internal mempunyai tingkat signifikan 0,000 < 0,05 dan t_{hitung} sebesar 4,480 lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 2,01290 atau dapat dikatakan variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Secara simultan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan dengan nilai determinasi sebesar 48,3%.

Kata Kunci: Efisiensi Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal dan Transparansi Laporan Keuangan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan berupa rahmat, hidayah dan inayahnya dan juga kesehatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang telah membawa risalah Islam berupa ajaran yang hak lagi sempurna bagi manusia dan seluruh penghuni alam ini.

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan menyusun skripsi yang berjudul "**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN".** Tahun ajaran 2019/2020

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bimbingan dan motivasi serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan maupun hambatan, namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak dan izin dari Allah SWT, maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat penulis hadapi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor UIN- SU Medan.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU Medan.
3. Bapak Dr. Fauzi Arif Lubis, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU Medan.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU Medan.

5. Bapak Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN- SU Medan.
6. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan selaku dosen pembimbing skripsi I yang tak pernah lelah memberikan semangat, memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis mulai awal penyusunan skripsi sampai penyelesaian skripsi.
7. Bapak Hendra Harmain, SE, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah yang tak pernah lelah memberikan semangat, memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir.
8. Ibu Kusmilawaty, SE, Ak, M.Ak selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik mulai awal perkuliahan sampai penyelesaian proposal.
9. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I sebagai dosen pembimbing skripsi II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan dan saran-saran yang baik mulai awal penyusunan skripsi sampai penyelesaian skripsi.
10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan serta membantu penulis dalam kegiatan selama perkuliahan.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda Ir. Bunyamin dan Ibunda Husni Syafrina, SE yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, memberikan semangat serta mendoakan dan menginspirasi secara moril dan material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
12. Seluruh anggota/staff BPKAD khusunya di Bidang Akuntansi yang telah meluangkan waktu kepada peneliti ditengah kesibukannya
13. Keluarga besar Akuntansi Syariah angkatan 2016 terkhusus kelas E yang selama ini telah berjuang bersama selama masa perkuliahan, yang telah

memberikan semangat, motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Sahabat saya Indah Sindiana, Dian Syahfitri, Aziz Aulia, Harry Anugerah Irawan, Febrian Nanda, Adji Laksono dan Vina Rahmi Dwi Asmara yang selalu memberikan semangat, motivasi dan inspirasi kepada penulis. Semoga persaudaraan ini kekal sampai Jannah-Nya Allah Subhana wa ta'ala. Aamiin.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang mendukung serta banyak membantu penulis mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, bimbingan dan pengarahan serta dorongan yang diberikan, penulis panjatkan do'a agar seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga amal baik mereka diterima dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun penulis berikutnya, dan juga pembaca dimasa yang akan datang.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan, Aamiin ya Rabbal'Alaamiin.

Medan, 19 Januari 2021

Penulis

Befiriana Moniza

NIM. 0502162138

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN i

ABSTRAK..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah..... 8
C. Batasan Masalah 9
D. Perumusan Masalah 9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 10

BAB II KAJIAN TEORITIS 11

A. Kajian Teoritis 11
1. Penyajian Laporan Keuangan 11
a. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan..... 11
b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan 13
c. Standar Penyajian Laporan Keuangan 14
d. Unsur-Unsur Laporan Keuangan 15
e. Karakteristik Laporan Keuangan 17
2. Aksesibilitas..... 19
a. Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan 19
b. Tujuan Aksesibilitas Laporan Keuangan..... 20
c. Standard Aksesibilitas Laporan Keuangan..... 20
3. Pengendalian Internal..... 21

a. Pengertian Pengendalian Internal 21
b. Tujuan Pengendalian Internal 22
c. Prinsip Pengendalian Internal 23
d. Komponen Pengendalian COSO 25
4. Transparansi Laporan Keuangan 29
a. Pengertian Transparansi Laporan Keuangan 29
b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Transparan 31
c. Karakteristik Transparansi Laporan Keuangan 32
d. Tujuan Transparansi Laporan Keuangan 32
e. Transparansi Laporan Keuangan Menurut Perspektif Islam 33
5. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Laporan Keuangan 37
6. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan . 37
7. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan 37
B. Penelitian Sebelumnya 38
C. Kerangka Teoritis 44
D. Hipotesa 45

BAB III METODE PENELITIAN 46

A. Pendekatan Penelitian 46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 46
1. Lokasi Penelitian 46
2. Waktu Penelitian 46
C. Populasi dan Sampel 47
1. Populasi 47
2. Sampel 48
D. Data Penelitian 48
1. Jenis Data 48
2. Sumber Data 48
E. Teknik Pengumpulan Data 49

F. Definisi Operasional 50
G. Teknik Analisis Data 52
1. Analisis Deskriptif 52
2. Uji Kualitas Data 53
a. Uji Validitas 53
b. Uji Realibilitas 53
3. Uji Asumsi Klasik 54
a. Uji Normalitas 54
b. Uji Multikolinearitas 54
c. Uji Heteroskedastisitas 55
4. Analisis Regresi Linear Berganda 55
5. Uji Hipotesis 56
a. Koefisien Determinan 56
b. Uji Parsial (Uji t) 57
c. Uji Simultan (Uji F) 57

BAB IV TEMUAN PENELITIAN 58

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan 58
1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan 58
2. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 58
3. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 59
B. Deskripsi Data Penelitian 60
C. Hasil Penelitian 63
1. Analisis Statistik Deskriptif 63
2. Uji Kualitas Data 64
a. Uji Validitas 64
b. Uji Reliabilitas 65
3. Uji Asumsi Klasik 67
a. Uji Normalitas 67

b. Uji Multikolinearitas 68
c. Uji Heteroskedastisitas 69
4. Uji Regresi Linear Berganda 69
5. Uji Hipotesis 71
a. Uji Parsial (Uji t) 71
b. Uji Simultan (F) 73
c. Uji Koefisien Determinasi (R^2) 73
6. Pembahasan 74
a. Pengaruh Penyajian Laporan terhadap Transparansi Laporan Keuangan 74
b. Pengaruh Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan 75
c. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan 76
d. Pengaruh Pengendalian Internal, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan 76
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 38
Tabel 3.1 Daftar Jumlah Pegawai 47
Tabel 3.2 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 51
Tabel 3.3 Tingkat Reliabilitas *Cronbach's Alpha* 53
Tabel 4.1 Distribusi Kuisioner 60
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 61
Tabel 4.3 Kategori Responden 61
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Responden 62
Tabel 4.5 Tingkat Usia Responden 62
Tabel 4.6 Lama Bekerja Responden 62
Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 63
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan 64
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Aksesibilitas 64
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal 64
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Transparansi Laporan Keuangan 65
Tabel 4.12 Hasil Uji Reabilitas Penyajian Laporan Keuangan 66
Tabel 4.13 Hasil Uji Reabilitas Aksesibilitas 66
Tabel 4.14 Hasil Uji Reabilitas Pengendalian Internal 66
Tabel 4.15 Hasil Uji Reabilitas Transparansi Laporan Keuangan 66
Tabel 4.16 Hasil Uji Normalitas 67
Tabel 4.17 Hasil Uji Multikolinearitas 68
Tabel 4.18 Hasil Uji Heteroskedastisitas 69
Tabel 4.19 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 70
Tabel 4.20 Hasil Uji Parsial 71
Tabel 4.21 Hasil Uji Simultan 73
Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual..... 44

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan akuntansi di zaman globalisasi dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengambil segala keputusan-keputusan yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan, baik dari akuntansi sektor publik maupun sektor swasta. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga atau organisasi sektor publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik.[1] Akuntansi sektor publik ini terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik dan transparansi publik terkait dengan penggunaan dana masyarakat didalamnya.[2]

Transparansi keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin meningkat dan mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Faktor yang lain yang menyebabkan meningkatnya dan menjadi pusat perhatian isu transparansi di Indonesia adalah maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia terkhususnya di pemerintahan menuntut adanya transparansi laporan keuangan yang menjadi salah satu tujuan dari sebuah instansi untuk dapat meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pentingnya transparansi keuangan publik di Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan tentang keterbukaan informasi

---

[1] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media , 2010), h. 7

[2] Dedi Nordiawan, Ayuningtyas Hertanti, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h. 6

publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Melalui Undang-undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus terbuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik.[3]

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.[4] Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.[5]

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi transparansi. Salah satu faktor yang mempengaruhi transparansi adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hal yang sangat penting, karena merupakan suatu elemen dasar dari transparansi keuangan publik dan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah. Jika penyajian laporan keuangan suatu entitas dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka terciptanya tujuan suatu pemerintah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga dalam menyajikan laporan keuangan secara transparansi.

---

[3] Farid Hamid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 331

[4] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media , 2010), h. 14

[5] Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, (Bandung: Fokus Media, 2009), h. 23

Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi transparansi adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Jika pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan maka akan meningkatkan kualitas transparansi keuangan dengan akses yang bisa dicapai oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tentunya dapat mengetahui informasi laporan keuangan dan juga dapat melakukan pengawasan dengan lebih leluasa.

Adapun faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi transparansi adalah pengendalian internal. Pengendalian internal dalam ruang lingkup akuntansi memiliki dampak yang sangat besar karena dengan adanya pengendalian internal suatu entitas dapat tercapainya tujuan dan terciptanya kinerja yang baik. Pengendalian internal diterapkan dalam kegiatan pemerintahan bertujuan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.[6] Sehingga jika pengendalian internal dilakukan oleh suatu entitas dengan baik maka terciptanya transparansi yang merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik yang berhak untuk mengetahuinya.

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk dari kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas pemerintah yang memenuhi karakteristik laporan keuangan serta penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan semua pengguna.

---

[6] Nur Laila Yuliani. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol. 24 No. 1, 2017, h. 2

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif agar laporan keuangan berkualitas. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya.[7]

Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan faktor yang penting terwujudnya transparansi pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya. Publikasi laporan keuangan dapat dilakukan dengan akses yang diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.[8]

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, mejamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang

---

[7] *Ibid.*, h. 2

[8] *Ibid.*

akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksudkan meliputi peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti-korupsi, dan sebagainya. Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun financial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.[9]

Pengendalian internal dalam kegiatan pemerintah juga sangat dibutuhkan agar terciptanya kinerja yang baik. Pengendalian internal diterapkan dalam kegiatan pemerintahan guna untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dalam pemerintahan diwujudkan melalui SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO).[10]

Di dalam penelitian ini, penulis memilih di Pemerintah Kota Medan sebagai objek penelitian. Kota Medan merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia serta merupakan kota terbesar ke-3 di Indonesia. Saat ini Pemerintah Kota Medan menjadi perhatian masyarakat yang dimana pemerintah kota medan sebagai pusat dari kota masa depan demi membangun Negara Indonesia yang sejahtera, mampu berdaya saing, menciptakan solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial yang dituntut untuk mampu menilai kondisi dan perkembangan daerah kota Medan agar mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah sehingga perlu diperhatikan laporan keuangan milik pemerintah kota

---

[9] Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 11

[10] Nur Laila Yuliani, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", h. 2

Medan dan ada hak untuk masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan untuk mengetahui informasi laporan keuangan yang transparan. Transparansi ini dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku untuk kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.

Fenomena yang terjadi pada saat ini terlihat dari tingkat transparansi laporan keuangan Pemerintah Kota Medan yang masih perlu ditingkatkan. Hal ini dikarenakan diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Di samping itu, Pemerintah Kota Medan sudah memiliki situs atau *website* yang dapat diakses pada alamat https://pemkomedan.go.id. Diluncurkannya *website* resmi tersebut bertujuan untuk semakin terbukanya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat luas.[11] Namun, masalah lain yang terjadi adalah laporan keuangan masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui website Pemerintah Kota Medan, internet, surat kabar atau pun akses publik lainnya belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan dan belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada masyarakat (publik).

Masyarakat berhak untuk mengetahui terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain masyarakat berhak untuk mengetahui kebijakan pemerintah, berhak untuk mengetahui keputusan yang diambil pemerintah, berhak untuk mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu, berhak untuk diberi informasi secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik, berhak untuk didengar aspirasinya yang meliputi hak untuk diberi aspirasi atau suara dalam pengambilan keputusan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk

[11] Lihat web http://pemkomedan.go.id diunduh tanggal 21-02-2020

pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan.[12]

Selain itu, terdapat fenomena yang terjadi diluar perusahaan (eksternal) pada saat ini yaitu masih banyak ditemukan masalah serius pada transparansi di Indonesia salah satunya maraknya kasus korupsi. Korupsi merupakan salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia, hal tersebut diakibatkan dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak dikelola dan diatur dengan baik, tidak hanya terjadi pada ibukota maupun kota-kota besar namun juga terjadi pada kota-kota daerah kecil sehingga ini berdampak pada laporan keuangan yang disajikan. Serta sebagian besar pemerintah daerah masih lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD saja daripada rakyat luas.[13] Ini terlihat dari praktik yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang tidak terjadi kesinambungan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana sehingga hak rakyat untuk mengetahui (transparansi) tidak terpenuhi.

Beberapa penelitian terdahulu diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Nur Laila Yuliani (2017) dengan judul *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* menyatakan bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Sedangkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Kemala Ayu Tri Wintari dan Ketut Alit Suardana (2018) dengan penelitian yang berjudul *Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*, hasil penelitian menyatakan bahwa tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Penelitian dengan judul *Pengaruh*

---

[12] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), h. 68

[13] Nur Laila Yuliani, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", h. 1

Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon yang dilakukan oleh Salomi J. Hehanussa (2015), menyatakan bahwa hasil penelitiannya membuktikan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari beberapa hasil penelitian yang telah disebutkan memiliki hasil yang tidak konsisten hal ini disebabkan entitas tidak melakukan tugas dan jabatannya yang terstruktur sesuai dengan SAP (Standard Akuntansi Pemerintah) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan sehingga terjadi hasil penelitian yang tidak konsisten. Dimana seharusnya jika semakin baik penyajian laporan keuangan daerah akan berdampak positif terhadap transparansi, dan semakin tinggi tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah maka semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan, serta peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2016 sampai dengan 2018 Pemerintah Kota Medan mendapat perolehan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam tiga tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.
2. Aksesibilitas atas laporan keuangan masih cenderung dianggap sebagai dokumen rahasia sehingga publikasi atas laporan keuangan dimaksud, melalui internet, surat kabar atau pun akses publik lainnya belum menjadi

hal yang umum untuk dilaksanakan dan belum mampu menyediakan semua informasi keuangan secara terbuka kepada publik.

3. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola masih belum sesuai dengan SAP serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga masih terdapat informasi-informasi yang belum cukup dijelaskan secara detail dalam laporan keuangan.

C. Batasan Masalah

Penulisan ini lebih difokuskan mengenai Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal dan Transparansi Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat mengenai latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan?
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan?
4. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.

b. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.
c. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.
d. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat berguna dan memiliki manfaat antara lain:

a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai hal - hal yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Bagi Pemerintah Kota Medan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi Pemerintah Kota Medan bahwa pentingnya penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal untuk meningkatkan atau memaksimalkan transparansi laporan keuangan.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah sumber pustaka di bidang ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan representatif khususnya yang behubungan dengan transparansi laporan keuangan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Penyajian Laporan Keuangan

a. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah Keuangan (SAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal: informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.[1]

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dengan tujuan untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sedangkan dalam Standar Akuntansi Keuangan dijelaskan tentang tujuan laporan keuangan yang isinya: “Tujuan laporan

---

[1] V. Wiratna Sujarweni, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 53

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi."[2]

Urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:[3]

1) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

   Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini akhirnya memuat informasi mengenai hal usaha perusahaan, yaitu laba/rugi bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi beban.

2) Laporan Modal Pemilik (Statement of Owner's Equity)

   Adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu (laporan perubahan modal). Modal pemilik akan bertambah dengan adanya investasi (setoran modal) dan laba bersih, sebaliknya modal pemilik akan berkurang dengan adanya *prive* (penarikan/pengambilan uang tunai untuk kepentingan pribadi pemilik) dan rugi bersih. Pada perusahaan perseroan (*corporation*), laporan laba ditahan (*retained earning statement*) dibuat untuk menyajikan ikhtisar perubahan dalam saldo laba ditahan.

3) Neraca (*Balance Sheet*)

   Sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan neraca adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.

4) Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flow*)

   Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, mulai

---

[2] Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah I*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 2

[3] Hery, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 6

dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan (pembiayaan) untuk satu periode waktu tertentu.

Selain itu, catatan Atas Laporan Keuangan (*Notes to the Financial Statement*) merupakan bagian integral (satu kesatuan) yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Seperti yang diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Secara umum, keuangan daerah yang dikelola melalui manajemen keuangan perusahaan dengan pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada pada suatu daerah dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.[4] Laporan keuangan juga disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.[5]

Beberapa tujuan penyajian laporan keuangan adalah:[6]

1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan.

---

[4] Muhammad Ikhsan Harahap, et.al. "Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* Vol 5 No 2, 2013, h. 249

[5] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.10

[6] Peggy Sande. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 2013, h. 6

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan.
4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

c. Standar Penyajian Laporan Keuangan

Untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban secara lengkap sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 31 yang dinyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan oleh kepala daerah setidak-tidaknya meliputi:[7]

1) Laporan Realisasi APBD

   Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (PP No. 24 Tahun 2005)

2) Neraca

   Penyajian laporan keuangan berupa neraca sangat penting, sebab pemerintah mempunyai aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

---

[7] Wildan Andika Syaifullah, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)*", (Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta), 2016, h. 36

3) Laporan Arus Kas

Menurut Penyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2, pengertian laporan arus kas adalah memberi informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas dari suatu perusahaan melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode akuntansi.

4) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pembuatan catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan (PP No. 24 Tahun 2005).

d. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Dalam SFAC No. 6, FSAB telah mendefinisikan 10 unsur laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan posisi keuangan dan hasil kinerja perusahaan. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan membentuk struktur sebuah laporan keuangan. Berikut adalah unsur-unsur laporan keuangan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh FSAB dalam SFAC No. 6, yaitu:[8]

1) Aktiva

Adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Aktiva terdiri dari aset lancer, aset lancer dan aset tak berwujud.[9]

---

[8] Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah I*, h. 38

[9] Alfurkaniati, et. al., *Pengantar Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016), h. 38

2) Kewajiban

Adalah pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

3) Ekuitas

Adalah kepemilikan atau kepentingan residu dalam aktiva entitas, yang masih tersisa setelah dikurangi dengan kewajibannya.

4) Investasi oleh Pemilik

Adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang dihasilkan dari penyerahan sesuatu yang bernilai oleh entitas lain untuk memperoleh atau meningkatkan bagian kepemilikannya.

5) Distribusi Kepada Pemilik

Adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) entitas yang disebabkan oleh penyerahan aktiva, jasa atau terjadinya kewajiban entitas kepada pemelik. Distribusi kepada pemilik ini akan menurunkan bagian kepemilikan (modal) entitas.

6) Laba Komprehensif

Adalah perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik.

7) Pendapatan

Adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

8) Beban

Adalah arus keluar aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang,

pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

9) Keuntungan

Adalah kenaikan dalam ekuitas (aktiva sendiri) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periperal (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.

10) Kerugian

Adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva sendiri) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi periperal (transaksi di luar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya serta peristiwa maupun keadaan-keadaan lainnya yang memengaruhi entitas, tidak termasuk yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.

e. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pmerintah (SAP) No. 01 Karakteristik Kualitatif Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya atau menghasilkan informasi yang berkualitas. Suatu informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas jika para pengguna laporan keuangan berdasarkan pemahaman dan pengetahuan mereka masing-masing dapat mengerti dan menggunakan informasi akuntansi yang disajikan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.[10]

[10] Nur Laila Yuliani, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", h. 5

Karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, adapun empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu:[11]

1) Relevan

Informasi dikatakan revelan apabila informasi tersebut berkemampuan untuk membuat perbedaan di dalam suatu keputusan. Untuk menjadi relevan, informasi harus dapat memberi ketegasan atau memberi pengaruh perubahan atas harapan pembuat keputusan serta informasi yang memiliki nilai prediksi, nilai umpan balik dan tersedia tepat waktu.

2) Andal

Andal yaitu laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Informasi dikatakan andal apabila penyajian secara jujur, dapat diverifikasi dan netralitas.

3) Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau entitas pelaporan lain pada umumnya. Agar informasi yang disajikan dapat dibandingkan maka penyajian laporan keuangan pemerintah minimal harus disajikan dalam dua periode atau dua tahun anggaran.

4) Dapat dipahami

Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mengetahui isi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

---

[11] Arfan Ikhsan, et. al., *Analisa Laporan Keuangan,* (Medan: Madenatera, 2018), h. 8

2. Aksesibilitas

a. Pengertian Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan.[12] Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.[13]

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. Masyarakat sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak berkepentingan.

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi dan *website* (*Internet*) dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD

---

[12] Salomi J. Hehanussa. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 2 No. 2, 2015, h. 3

[13] Septa Purwaningrum, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponogoro), 2018, h. 41

saja, akan tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.[14]

b. Tujuan Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam organisasi sektor publik dapat ditingkatkan dengan dibuatnya Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk:[15]

1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, yaitu yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
2) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

c. Standard Aksesibilitas Laporan Keuangan

Di Indonesia, aksesibilitas laporan keuangan pemerintah juga diamanahkan dalam beberapa UU, PP dan Kepmen antara lain sebagai berikut:[16]

1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan diperlukan motivasi yang benar dan kejujuran dari kepala daerah.

---

[14] Salomi J. Hehanussa, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*", h. 3

[15] Septa Purwaningrum, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo*", h. 43

[16] Imam Mulyono. "Aksesibilitas Laporan keuangan Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Di Internet", *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Malang*, 2013, h. 329

2) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar atau media lain.
3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bagian dari informasi publik sesuai dengan pasal 9 ayat 2c, yang menyatakan bahwa informasi mengenai laporan keuangan wajib diumumkan secara berkala.
4) PP No. 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara menyajikan pernyataan untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran daerah.

3. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, mejamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum / undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Ketentuan yang dimaksudkan meliputi peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, hukum bisnis, undang-undang anti-korupsi, dan sebagainya. Demikian juga pengendalian internal dilakukan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah

berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.[17]

Pengendalian internal adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.[18]

Dari uraian mengenai pengertian pengendalian internal di atas, jelas bahwa betapa pentingnya peranan pengendalian internal dengan tujuan untuk tercapainya tujuan suatu instansi atau suatu perusahaan. Dan hal ini dapat diketahui bagaimana perusahaan menerapkan sistem yang ada dan sumber daya guna untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipercaya serta berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian internal yang efektif dapat digolongkan sebagai berikut:[19]

1) Untuk menjamin kebenaran data akuntansi

   Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya dengan jalan mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan pada saat yang tepat untuk melaksanakan operasi perusahaan.

2) Untuk mengamankan harta kekayaan dan catatan pembukuannya

   Harta fisik perusahaan dapat saja dicuri, disalahgunakan ataupun rusak secara tidak disengaja. Dengan demikian, pengendalian internal

---

[17] Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 11

[18] Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), h. 82

[19] Amin Widjaja Tunggal, *Struktur Pengendalian Intern*, (Jakarta: PT Renika Cipta, 1995), h. 2

dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang dan catatan pembukuan pada saat yang tepat.

3) Untuk menggalakkan efisiensi usaha

Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan sumber-sumber dana yang tidak efisien.

4) Untuk mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang telah digariskan

Manajemen menyusun prosedur dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Pengendalian internal memberikan jaminan akan ditaatinya prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian internal secara ketat, diharapkan seluruh kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik menuju tercapainya maksimalisasi profit. Bahkan tidak hanya dari segi operasional yang akan berjalan dengan tertib dan baik sesuai prosedur, akan tetapi dari segi finansial perusahaan juga dapat lebih termonitor dengan baik. Jika pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya inefisiensi (pemborosan sumber daya), yang pada akhirnya akan membebani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan.[20]

c. Prinsip Pengendalian Internal

Untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan (informasi) akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan lima prinsip pengendalian internal tertentu. Tentu saja, ukuran dan luasnya pengendalian internal disesuaikan dengan besar kecilnya bisnis perusahaan, sifat atau jenis bisnis perusahaan, termasuk filosofi

[20] Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, h. 11

manajemen perusahaan. Masing-masing prinsip pengendalian internal akan dijelaskan sebagai berikut:[21]

1) Penetapan tanggung jawab

Penetapan tanggung jawab di sini supaya masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu (secara spesifik) yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang yang bertanggung jawab atas tugas atau pekerjaan tertentu tersebut.

2) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula dan harus adanya pemisahan tugas antar karyawan yang menangani langsung asset secara fisik (operasional).

3) Dokumentasi

Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dokumen ini sebagai sumber bukti transaksi seharusnya dapat segera diteruskan ke bagian/departemen akuntansi untuk menjamin pencatatan akuntansi secara tepat waktu, akurat, dan memenuhi kriteria kehandalan catatan akuntansi secara kronologis.

4) Pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik sangat penting. Pengendalian fisik terutama terkait dengan pengawasan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga mengamankan asset, seperti uang kas dan surat berharga sebaiknya disimpan dalam *safe deposits box*, catatan akuntansi yang penting juga harus disimpan dalam *filling cabinet* yang terkunci, penggunaan *password system* serta penggunaan kamera dari televisi monitor.

---

[21] *Ibid*, h. 14

5) Pengecekan independen atau verifikasi internal

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Untuk memperoleh manfaat maksimum dari pengecekan independen atau verifikasi internal, maka:

a) Verifikasi seharusnya dilakukan secara periodik/berkala atau dilakukan atas dasar dadakan.
b) Verifikasi sebaiknya dilakukan oleh orang yang independen.
c) Ketidakcocokan/ketidakpastian dan kekecualian seharusnya dilaporkan ke tingkatan manajemen yang memang dapat mengambil tindakan kerektif secara tepat.

d. Komponen Pengendalian COSO

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*) adalah sekelompok swasta yang terdiri dari *American Accounting Association*, AICPA, the *Institute of Internal Auditors*, the *Institute of Management Accountants*, dan the *Financial Executives Institute*. Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan AS dikeluarkan oleh COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*). Komponen pengendalian internal COSO meliputi:[22]

1) Lingkungan pengendalian

Tanpa lingkungan pengendalian yang efektif, keempat komponen lainnya mungkin tidak akan menghasilkan pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai paying bagi keempat komponen pengendalian internal lainnya. Untuk memahami dan menilai lingkungan pengendalian, auditor perlu mempertimbangkan sub komponen dari lingkungan pengendalian itu sendiri, sebagai berikut:

[22] Hery, *Auditing dan Asurans*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), h. 134

a) Integritas dan Nilai-nilai Etis

Meliputi tindakan manajemen untuk mencegah karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, ilegal, atau tidak etis. Caranya adalah melalui sosialisasi kepada karyawan perihal nilai-nilai entitas harus dijunjung tinggi serta standar perilaku yang harus dipegang teguh dan dijalankan oleh seluruh karyawan.

b) Komitmen pada Kompetensi

Meliputi pertimbangan manajemen tentang persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi bagi pekerjaan tertentu. Setiap karyawan diharapkan dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya.

c) Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit

Dewan komisaris berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen telah mengimplementasikan pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan secara layak. Komite audit juga bertanggung jawab untuk melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan suditor internal maupun auditor eksternal, termasuk menyetujui jasa aduit dan non audit yang dilakukan oleh para auditor eksternal.

d) Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen

Dengan memahami gaya pengelolaan manajemen, auditor dapat merasakan sikap manajemen tentang pengendalian internal.

e) Struktur organisasi

Struktur organisasi menunjukkan tingkatan tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam setiap devisi atau bagian. Dengan memahami struktur organisasi klien, auditor dapat mempelajari perihal pengelolaan entitas dan unsur-unsur fungsional bisnis serta melihat bagaimana pengendalian atas pengelolaan tersebut diterapkan.

f) Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas)

Karena pentingnya sumber daya manusia bagi keberhasilan sebuah entitas (pengendalian), metode atau kebijakan untuk mengangkat, mengevaluasi, melatih, mempromosikan, dan member kompensasi kepada karyawan merupakan bagian yang penting dari pengendalian internal.

2) Penilaian Risiko

Merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.

Penilaian risiko oleh manajemen berbeda dengan penilaian risiko oleh auditor, walaupun ada keterkaitannya. Apabila manajemen menilai risiko sebagai bahan dari perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal untuk memperkecil kekeliruan serta kecurangan, sedangkan auditor menilai risiko untuk memutuskan jenis dan cakupan bukti yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. Jika manajemen dan menanggapi risiko tersebut, biasanya auditor akan mengumpulkan lebih sedikit bukti audit daripada jika manajemen gagal dalam mengidentifikasi atau menindaklanjuti risiko yang signifikan.

Auditor dapat mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan manajemen melalui penggunaan kuisioner atau diskusi dengan manajemen terkait untuk menentukan bagaimana manajemen klien mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pelaporan keuangan, mengevaluasi signifikansi dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, serta untuk memutuskan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi risiko yang muncul.[23]

3) Aktivitas Pengendalian

Hal ini merupakan kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko

[23] *Ibid*, h. 136

telah diambil guna mencapai tujuan entitas. Kebijakan dan prosedur tersebut terdiri atas:

a) Pemisahan tugas

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisahan fungsi atau pembagian kerja. Ada dua bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula dan harus adanya pemisahan tugas antar karyawan yang menangani langsung asset secara fisik (operasional).

b) Otorisasi yang tepat atas transaksi

Agar pengendalian berjalan dengan baik, setiap transaksi harus diotorisasi dengan tepat. Sesungguhnya, karakteristik yang paling utama dari pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan secara spesifik.

c) Dokumen dan catatan yang memadai

Dokumen dan catatan merupakan objek fisik di mana transaksi akan dicantumkan serta diikhtisarkan. Dokumen yang memadai sangat penting untuk mencatat transaksi dan mengendalikan aset.

d) Pengendalian fisik atas aset dan catatan

Untuk menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai aset dan catatan harus dilindungi. Jika tidak diamankan sebagaimana mestinya, aset dapat dicuri, diselewengkan atau disalahgunakan.

e) Pemeriksaan independen atau verifikasi internal

Kebanyakan sistem pengendalian internal memberikan pengecekan independen atau verifikasi internal. Prinsip ini meliputi peninjauan ulang, perbandingan dan pencocokan data yang telah disiapkan oleh karyawan lainnya yang berbeda.

4) Informasi dan komunikasi akuntansi

Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi adalag agar transaksi yang dicatat, diproses dan dilaporkan telah memenuhi keenam tujuan audit umum atas transaksi, yaitu:[24]

a) Transaksi yang dicatat emang ada
b) Transaksi yang ada sudah dicatat
c) Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar
d) Transaksi yang dicatat diposting dan diikhtisarkan dengan benar
e) Transaksi diklasifikasi dengan benar
f) Transaksi dicatat pada tanggal yang benar.

Dengan kata lain, sistem akuntansi harus dirancang untuk memastikan perihal keterjadian, kelengkapan, keakuratan, posting dan pengikhtisaran, klasifikasi dan penetapan waktu transaksi dicatat.

5) Pemantauan

Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian atas mutu pengendalian internal secara berkesinambungan (berkala) oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian telah berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam perusahaan. [25]

4. Transparansi Laporan Keuangan

a. Pengertian Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan.[26] Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang

[24] *Ibid*, h. 143

[25] *Ibid*, h. 145

[26] Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, h. 14

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Adapun dalam UUD 1945 Pasal 28 F, menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.[27]

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, transparansi adalah keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.[28]

Dari uraian mengenai pengertian transparansi laporan keuangan di atas, jelas bahwa transparansi berarti keterbukaan dan kebebasan akses bagi semua pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi keuangan seperti peraturan, kebijakan pemerintah dan lainnya yang dapat diakses oleh publik dan dibuat bertujuan untuk menciptakan kejujuran atas pertanggungjawaban pemerintah dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan serta dapat mengurangi ketidakpastian pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

---

[27] Farid Hamid dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, h. 331

[28] Tim Penyusun, *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, h. 23

b. Faktor-faktor yang Memengaruhi Transparansi

Terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pelaporan keuangan sebagai berikut:[29]

1) Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.

2) Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

3) Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang digunakan dalam sebuah entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut agar dapat terciptanya transparansi laporan keuangan.

4) Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal merupakan hasil dari tekanan formal dan informal yang diberikan pada organisasi oleh organisasi lain dimana organisasi tergantung dengan harapan budaya masyarakat di mana organisasi menjalankan fungsinya.

5) Ketidakpastian Lingkungan

Ketidakpastian lingkungan adalah kecenderungan organisasi untuk memodelkan dirinya pada perilaku organisasi lain. Ketidakpastian lingkungan dapat disebabkan oleh berbagai hal di luar organisasi, seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dan sebagainya.

---

[29] Arum Indri Hastuti, "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Buyolali*", (Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2015, h. 6

6) Komitmen Manajemen

Perubahan komitmen dapat berdampak pada masalah karakter dan integritas organisasi. Strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam dan lebih menuntut daripada inisiatif kepatuhan atas hukum.

c. Karakteristik Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi memiliki tiga karakteristik, yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengunggakapan (*Disclosure*)[30]

1) Informatif (*Informative*)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas, akurat, tepat waktu, memadai, dapat dibandingkan serta dapat mudah diakses.

2) Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik member hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik.

3) Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja financial seperti kondisi keuangan, susunan pengurus serta bentuk perencana dan hasil dari kegiatan.

d. Tujuan Transparansi Laporan Keuangan

Dengan menerapkan transparansi tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, tujuan transparansi terhadap pengelolaan keuangan yang dapat dirasakan *stakeholders* adalah:[31]

---

[30]Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, h. 72

[31] Fierda Shafratunnisa, "*Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*" (Skripsi Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2015, h. 28

1) Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.
2) Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi.
3) Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
4) Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.
5) Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan prinsip.

e. Transparansi Laporan Keuangan Menurut Perspektif Islam

Transparansi dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Islam memiliki pandangan bahwa transparansi ini merupakan amanah dan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah SWT karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuatnya.

Transparansi dalam perspektif Islam adalah:

1) Organisasi bersifat terbuka kepada masyarakat. Seluruh fakta yang terkait aktifitas informasi pengelolaan keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tesebut.
2) Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3) Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.

Selain itu, organisasi juga harus mengkomunikasikan segala kebijakan yang mereka lakukan kepada pemberi amanah.[32]

---

[32] Rizki Khaerany, et al., *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: Universitas Hasanuddin), h. 31

Dalam Islam orang-orang muslim harus mengikuti kehendak Allah dengan mencari ridha-Nya dalam seluruh kegiatannya. Dalam memandang penerapan *corporate governance* dari perspektif Islam, maka pemimpin perusahaan, manajemen maupun auditor seharusnya menunjukkan tugas professional mereka dengan tujuan memuaskan kebutuhan-kebutuhan *stakeholders* dan pertanggungjawaban kepada Allah. Hal ini menunjukkan konsep transparansi dalam perspektif Islam yang telah diungkapkan oleh Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 282 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ
بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ
وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا
أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ
فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ
إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن
تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا
تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ
فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia

sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seseorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (member keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mua'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu."[33]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan Allah kepada umat manusia yang menaruh perhatian besar terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), selalu menyampaikan segala sesuatu secara benar dan transparan, menjunjung tinggi kejujuran, melakukan pekerjaan dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi.

Tidak hanya terdapat di Al-Qur'an saja, tetapi juga terdapat di dalam hadits yang merupakan salah satu sumber ajaran Islam termasuk dalam ekonomi. Hadits sebagai sumber hukum dan moral dalam agama Islam sehingga bisa dijadikan contoh dan panutan bagi mereka.[34] Terdapat hadits

---

[33] Kementrian Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 48

[34] Yenni Samri Juliati Nasution, et. al., *Hadis-hadis Ekonomi*, (Medan: Kencana, 2017), h. 5

yang menjelaskan bagaimana transparansi dalam bekerja pengelolaan laporan keuangan yaitu hadits riwayat muslim yang berbunyi:

عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمْنَا مِحْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلَامًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ: وَ مَا لَكَ، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ أَنَا أَقُوْلُهُ الْآنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَ كَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ وَ مَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى. (رواه مسلم).

Artinya: Bersumber dari Adi bim Amirah al-Kindi berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: “Barang siapa yang aku pekerjakan di antara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka hal itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat”. Ia berkata: “Ada seseorang yang hitam dari Kaum Ansahr berdiri, seakan-akan saya memandangnya, dan ia berkata: “Wahai Rasulullah, terimalah saya bekerja”. Rasul menjawab: “Aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini”, maka Rasul berkata: “Aku katakan sekarang, barang siapa yang aku pekerjakan suatu pekerjaan maka hendaklah menghadirkan sedikit dan banyaknya; apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang ditinggalkan”. (H.R. Muslim)[35]

Dalam hadits tersebut tersirat bahwa sikap terbuka dibutuhkan dalam berbagai jenis pekerjaan. Sikap keterbukaan dan nilai-nilai kejujuran sangat dianjurkan dalam Islam yang bertujuan untuk menghapus rasa kecurigaan antar sesama umatnya yang dimana harus bersikap transparan. Hadits ini juga menjelaskan bahwa segala apapun yang kita kerjakan mau yang disengaja atau tidak disengaja, akan dipertanggungjawabkan di akhirat tanpa melihat siapa orang tersebut.

---

[35] Hardianto Prihasmoro, *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim*, (Jakarta: Jamal Al-Nasir, 2007), 218

5. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintah Keuangan (SAK) adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara.[36]

Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), Sastra (2013), Wahyuni, dkk (2014) dan Apriliani, dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja daerah.[37]

6. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sector publik yang transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Aliyah dan Nahar (2012), Apriliani, dkk (2015) dan Wahyuni (2014) menunjukkan hasil bahwa aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah maka semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan.[38]

7. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Menurut *Committeee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 1994), pengendalian internal didefinisikan sebagai

---

[36] V. Wiratna Sujarweni, *Pengantar Akuntansi*, h. 53

[37] Nur Laila Yuliani, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*", h. 6

[38] *Ibid*, h. 7

suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi atau top management, personel-personel lainnya, yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kemala Ayu Tri Wintari dan Ketut Alit Suardana (2018), Nur Laila Yuliani (2017) dan Sari (2012) menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan. Peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan.[39]

B. Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nur Laila Yuliani (2017)[40]	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis ini menunjukkan bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah.

[39] *Ibid*

[40] Nur Laila Yuliani. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang*, Vol. 24 No. 1, 2017

2	Embun Widya Sari (2017)[41]	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian intern dan aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan dan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3	Komang Ayu Tri Wintari dan Ketut Alit Suardana (2018)[42]	Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan eksternal, pengendalian internal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.
4	Nabila Ayu Indria (2018)[43]	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan

[41] Embun Widya Sari. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu", *Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru*, Vol. 4 No. 1, 2017

[42] Komang Ayu Tri Wintari. "Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan", *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol . 22, 2018

[43] Nabila Ayu Indria, "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya*", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

		Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya		akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan pemerintah daerah.
5	Siti Kemala Sari Tambunan (2018)[44]	Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah kota medan.
6	Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta (2015)[45]	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah, karakteristik kualitatif dan aksesibilitas berpengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

[44] Siti Kemala Sari Tambunan, "*Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan*", (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area Medan, 2018)

[45] Ni Kadek Alit Apriliani, et. al. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung)" *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Pendidikan Ganesha*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2015

		Klungkung)		
7	Salomi J. Hehanussa (2016)[46]	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
8	Siti Aliyah dan Alda Nahar (2012)[47]	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesbilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
9	Nur Azizah, Junaidi dan Achdiar Redy	Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesbilitas Laporan	Metode yang digunakan adalah metode	Hasil analisis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah tidak

[46] Salomi J. Hehanussa. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung*, Vol. 2 No. 2, 2015

[47] Siti Aliyah dan Aida Nahar. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara" *Jurnal Akuntansi dan Auditing Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2012

	Setiawan (2015)[48]	Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	kuantitatif	berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap transparansi namun berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi.
10	Tias Rusmita (2019)[49]	Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Lampung Selatan	Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Lampung Selatan

[48] Nur Azizah, et. al. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinasi Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah" *Jurnal Riset dan Aplikasi:Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015

[49] Tias Rusmita, "*Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Kabupaten Lampung Selatan*", (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung, 2019)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Laila Yuliani, Embun Widya Sari, Komang Ayu Tri Wintari dan Ketut Alit Suardana, Nabila Ayu Indria, Siti Kemala Sari Tambunan, Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta, Salomi J. Hehanussa, Siti Aliyah dan Alda Nahar, Nur Azizah, Junaidi dan Achdiar Redy Setiawan serta Tias Rusmita terletak pada teknik analisis data yaitu menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan teknik ini juga yang digunakan dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Laila Yuliani dan Komang Ayu Tri Wintari dan Ketut Alit Suardana terletak teknik penentuan sampel yaitu teknik *purposive sampling* sedangkan pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik *sampling jenuh*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Embun Widya Sari dan Nur Azizah, Junaidi dan Achdiar Redy Setiawan terletak pada penambahan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan sedangkan pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu transparansi laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nabila Ayu Indria, Ni Kadek Alit Apriliani, Edy Sujana dan Gede Adi Yuniarta adalah tidak meneliti tentang pengendalian internal dan teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* sedangkan pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling jenuh.*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Siti Kemala Sari Tambunan terletak pada variabel independen yaitu tidak meneliti tentang penyajian laporan keuangan dan pengendalian internal akan tetapi terdapat variabel kualitas informasi keuangan sedangkan pada penelitian ini tidak meneliti tentang kualitas informasi keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Salomi J. Hehanussa, Siti Aliyah dan Alda Nahar serta Tias Rusmita adalah tidak meneliti tentang pengendalian internal dan penambahan variabel dependen yaitu terdapat variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan pada penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu transparansi laporan keuangan.

C. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan transparansi laporan keuangan sebagai variabel terikat dan menggunakan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal sebagai variabel bebas.

Transparansi laporan keuangan merupakan suatu alat untuk mengukur tingkat pengelolaan keuangan daerah apakah sudah memenuhi syarat transparansi atau tidak yang bertujuan untuk menyampaikan informasi keuangan yang terbuka kepada publik dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Untuk menciptakan transparansi ini pastinya memerlukan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal. Semakin tinggi tingkat penyajian laporan keuangan, aksesibilitas yang memberikan kemudahan terhadap publik dan pengendalian internal yang baik tentu menciptakan transparansi laporan keuangan yang akan semakin baik,

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

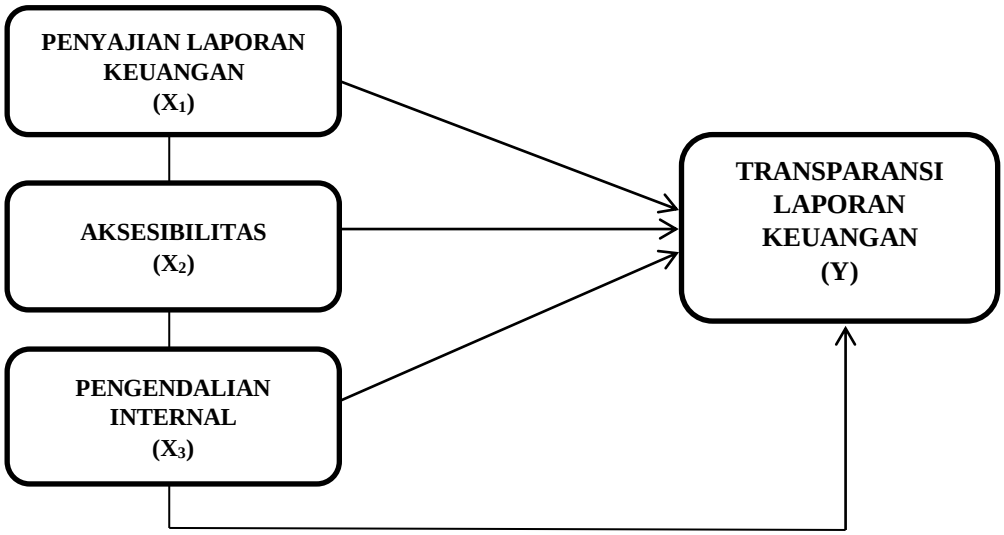

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kemampuan seseorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis. Sesuai dengan gambar kerangka konseptual (Gambar 2.1), maka dapat dijelaskan bahwa variable Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal dalam penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

D. Hipotesa

Hipotesa dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang diungkapkan dalam bentuk pertanyaan secara logis. Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka konseptual yang sudah diuraikan diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Ho_1 : Penyajian Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

   Ha_1 : Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.
2. Ho_2 : Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

   Ha_2 : Aksesibilitas berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.
3. Ho_3 : Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

   Ha_3 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.
4. Ho_4 : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

   Ha_4 : Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Transparansi Laporan Keuangan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menganalisis hubungan atau pengaruh antara dua atau lebih variabel.[1] Peneliti menggunakan pendekatan asosiatif karena pertanyaan dalam penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis menelaah bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.[2] Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan statistik.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintah Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Februari - Desember 2020.

---

[1] Kris H. Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 16

[2] Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 47

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan elemen-elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan.[3]

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 77 orang pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Medan. Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dijelaskan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Jumlah Pegawai

No	Keterangan	Jumlah
1	Kepala BPKAD	1
2	Sekretaris BPKAD	1
3	Kepala Bidang BPKAD	4
4	Kepala dan Staff Sub Bag Umum	5
5	Kepala dan Staff Sub Bag Peny. Program	4
6	Kepala dan Staff Sub Bag Keuangan	4
7	Bidang Anggaran	15
8	Bidang Perbendaharaan	24
9	Bidang Akuntansi	11
10	Bidang Aset dan Investasi	8
	Jumlah	77

Sumber : Daftar Hadir Pegawai BPKAD 22 Januari 2020

[3]Arfan Ikhsan, et. all., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h. 105

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah *Sampling Jenuh* yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang sebanyak 77 responden.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu jenis data yang diperoleh dari perusahaan berupa angka atau bilangan sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.[4]

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.[5] Data ini diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) yang nantinya akan diisi oleh responden yang bekerja di Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tentang penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal.

---

[4] Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 201

[5] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 42

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara objektif, terperinci dan baik sesuai dengan kejadian dan permasalahan yang ada, maka metode atau teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.[6] Tujuan nya adalah untuk mendapat informasi yang lebih akurat dari responden. Kuesioner diambil dari hasil penelitian terdahulu yang telah diuji oleh peneliti. Data ini merupakan data *cross section,* yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu dengan beberapa objek dengan tujuan menggambarkan keadaan.[7]

Pengukuran variabel-variabel dalam peneitian ini menggunakan skala Likert dimana responden menyatakan pendapatannya terhadap pernyataan. Setiap pertanyaan tersebut disertai dengan 5 alternatif jawaban yang harus dipilih responden dan setiap jawaban tersebut dinilai dengan angka sebagai berikut:

1. Jawaban sangat setuju (SS) diberi skor : 5
2. Jawaban setuju (S) diberi skor : 4
3. Jawaban kurang setuju (KS) diberi skor : 3
4. Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor : 2
5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi skor : 1

Data yang diperoleh dalam penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keandalan data dalam penelitian ini yang harus diuji validitas dan realibilitasnya.

---

[6]Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia,* h. 199

[7]Sulianto, *Metode riset Bisnis,* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), h. 134

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel peneliti yang dapat dituju.[8] Variabel penelitian adalah suatu sifat yang dapat memiliki berbagai macam nilai. Kalau diekspresikan secara berlebihan, variabel adalah sesuatu yang bervariasi. Variabel biasanya diekspresikan dalam bentuk simbol/lambang (umumnya digunakan simbol x dan y) yang padanya dilekatkan bilangan atau nilai.[9]

Ada dua macam variabel dalam penelitian ini, yaitu :[10]

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

   Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *y*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Transparansi Laporan Keuangan (Y).

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

   Variabel independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Variabel ini secara matematis disimbolkan dengan huruf *x*. Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas (X2) dan Pengendalian Internal (X3).

   Definisi operasional variabel penelitian dijelaskan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

---

[8] Achmad Sani dan Masyhuri Machfudz, *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*, h. 200

[9] Arfan Ikhsan, et. all., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, h. 66

[10] *Ibid*., h. 67

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	**Variabel Terikat** Transparansi Laporan Keuangan (Y)	Memberikan informasi laporan keuangan yang terbuka kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.	1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab. 2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap. 3. Kemudahan akses informasi. 4. Meningkatkan arus informasi kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.	Likert
2	**Variabel Bebas** Penyajian Laporan Keuangan (X_1)	Penyajian yang memenuhi karakteristik laporan keuangan serta disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan semua pengguna.	1. Relevan. 2. Andal. 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Likert
3	Aksesibilitas (X_2)	Kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya.	1. Media publikasi laporan keuangan yang mudah diakses. 2. Ketersediaan informasi saat dibutuhkan. 3. Accessible	Likert

4	Pengendalian Internal (X_3)	Seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum dan undang-undang telah dipatuhi sebagaimana mestinya.	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Pemantauan 5. Informasi dan komunikasi	Likert

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda, karena membahas tentang tiga buah variabel independen dan satu buah variabel dependen. Untuk mendukung hasil dan akurasi penelitian, data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan alat statistik melalui bantuan program SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi 26.0, kemudian dijelaskan secara deskriptif.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan model penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Dengan analisis deskriptif, dimungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal.[11]

Program aplikasi SPSS sebagai alat untuk membantu dalam metode analisis data. Berdasarkan data olahan SPSS yang meliputi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, pengendalian internal dan transparansi laporan keuangan maka akan diketahui nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari setiap variabel.

[11] *Ibid*., h. 33

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor setiap konstruknya. Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai $r_{tabel.}$

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah sebagai alat ukur yang berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan dari proses pengumpulan data dengan menggunakan instrumen.[12] Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar suatu pengukuran mengukur dengan stabil atau konsisten. Uji ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *cronbach alpha*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji reabilitas dengan *Cronbach's Alpha* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Tingkat Reliabilitas *Cronbach's Alpha*

Nilai *Cronbach's Alpha*	Tingkat Reliabilitas
0,00 – 0,20	Kurang Reliabilitas
0,21 – 0,40	Agak Reliabilitas
0,41 – 0,60	Cukup Reliabilitas
0,61 – 0,80	Reliabilitas
0,81 – 1,00	Sangat Reliabilitas

Reliabilitas suatu variabel dikatakan baik jika memiliki kriteria nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 maka kuisioner dinyatakan reliabel atau

[12] Sinulingga dan Sukaria, *Metodologi Penelitian*, (Medan: USU Press, 2015), h. 229

konsisten. Sementara, jika nilai *Cronbach's Alpha* < 0,60 maka kuisioner dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten.[13]

3. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam metode *Ordinary Least Square* (OLS). Sedikitnya terdapat empat uji asumsi yang harus dilakukan :[14]

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Model data regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal. Uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Sminov*. Dasar pengambilan keputusannya yaitu:[15]

1) Apabila nilai sigfikansi > 0,05 atau 5% maka data terdistribusi secara normal
2) Apabila nilai signifikansi < 0,05 atau 5% maka data tidak terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Model data regresi yang baik adalah data yang tidak terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing- masing

---

[13] V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 193

[14] Sinulingga dan Sukaria, *Metodologi Penelitian*, h. 186

[15] Rina Novianty Ariawaty, et. al., *Metode Kuantitatif Praktis*, (Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera, 2018), h. 20

variabel independen. Jika hasil output uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF adalah sebagai berikut *tolerance value* > 0,1 dan VIF < 10,00 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen pada model regresi.[16]

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model data regresi yang baik adalah data yang tidak mengalami heteroskedastisitas. Heterokedastisitas dideteksi dengan uji Gletsjer yaitu dengan melakukan regresi antara nilai residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan.[17] Hasil uji Gletsjer ditunjukkan dengan diperolehnya nilai signifikansi masing-masing variabel independen dalam persamaan regresi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan (X1), aksesibilitas (X2), dan pengendalian internal (X3) terhadap transparansi laporan keuangan (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. [18]

---

[16] *Ibid*, h. 28

[17] Arfan Ikhsan, et. al., *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, h. 188

[18] *Ibid*., h. 184

Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Transparansi Laporan Keuangan
a	=	Konstanta Persamaan Regresi
*b*1, *b*2, *b3*	=	Koefisien regresi untuk X1, X2, X3
X1	=	Penyajian Laporan Keuangan
X2	=	Aksesibilitas
X3	=	Pengendalian Internal
e	=	Faktor gangguan

5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut.[19] Tujuan dari uji hipotesis adalah untuk menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.[20] Uji hipotesis terdiri dari beberapa uji yaitu sebagai berikut :

a. Koefesien Determinan (R^2)

Koefesien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur saberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefesien determinan adalah diantara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil berati kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

---

[19] Laylan Syafina, *Panduan Penelitian Kuantitatif Akuntansi,* (Medan: Febi Press UINSU, 2018), h. 35

[20] *Ibid,* h. 36

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau lebih dikenal dengan sebutan uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variabel terikat.[21]

Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut :

1) Jika nilai t hitung > t tabel dan nilai Sig. t <*a* = 0,05 maka dapat disimpulakan bahwa secara parsial varibel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen
2) Jika nilai t hitung < t tabel dan nilai Sig, t >*a* = 0,05 maka dapat disimpulakan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau lenih dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.[22] Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah :

1) Jika F hitung > F tabel dan nilai Sig. F <*a* = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2) Jika F hitung < F tabel dan nilai Sig. F >*a* = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

[21]*Ibid*, h. 39

[22]*Ibid*, h. 37

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Medan

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Medan

Pemerintah Kota Medan berdiri berdasarkan UU Darurat No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kota Medan beraktivitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.[1]

Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu bagian yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan serta juga harus mempertanggungjawaban laporan keuangan secara wajar sekaligus sebagai tolak ukur bagi Pemerintah Kota Medan.[2] Dengan demikian, maka nantinya akan mampu meningkatkan atau memaksimalkan transparansi pada laporan keuangan.

2. Sejarah Singkat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dahulu masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian keuangan sekretariat daerah kota Medan dengan tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintah kota Medan. Mengingat pada saat itu potensi tugas pengelolaan keuangan pemerintah kota Medan

---

[1] Sofia Dora, "*Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)*", (Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan), 2014, h. 35

[2] Debby Tamara Enre, "*Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*", (Skripsi Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2020, h. 47

belum begitu kompleks maka sekarang bagian keuangan kota Medan terdiri dari anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset dan investasi. [3]

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintah Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna dan berhasil guna yang didukung dengan Kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan serta standar operasional dan prosedur (SOP).[4]

3. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Medan

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015 sebagai berikut: "Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Profesional, Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan Yang Sistematis, Efisien dan Efektif".[5]

Rasionalitas Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:[6]

a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.
b. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan.
c. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan Yang Berpengabdian.
d. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
e. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

---

[3] *Ibid*, h. 51

[4] *Ibid*

[5] BPKAD PemkoMedan, "Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan", http://bpkad.pemkomedan.go.id/statis-2-visidanmisi.html. Diunduh pada September 2020.

[6] *Ibid*

Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Medan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pihak-pihak lain yang berkepentingan agar harapan yang dicita-citakan pada masa mendatang akan tercapai yaitu:[7]

a. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur Pemerintah Kota Medan
b. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan
c. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan

B. Deskripsi Data Penelitian

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Sampling Jenuh. Sampling Jenuh* yaitu suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang sebanyak 77 responden. Penelitian ini menggunakan data primer. Data ini diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) yang nantinya akan diisi oleh responden yang terdiri dari, pegawai pada level yang acak yang bekerja di Bagian Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Berikut adalah tabel proses pembagian kuisioner serta tingkat pengembalian kuisioner:

Tabel 4.1
Distribusi Kuisioner

Kuisioner yang disebar	Kuisioner tidak kembali	Kuisioner Rusak	Jumlah Kuisioner
77	27	0	50

Sumber : Data Primer yang diolah, 2020

[7] *Ibid*

Respon Rate = 50/77 x 100% = 0,65

Unusabel Respon Rate = 27/77 x 100% = 0,35

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah kuisioner penelitian yang disebar kepada responden adalah sebanyak 77 namun hanya 50 yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil yang ada, respon pegawai terhadap penelitian ini baik terlihat dari banyak kuisioner yang diisi oleh para responden serta dapat diolah dan dijadikan sebagai sampel akhir.

Tabel 4.2
Jenis Kelamin Responden

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Total	Persentase (%)
Laki-laki	26	52%
Perempuan	24	48%

Sumber : Rekapitulasi Kuisioner

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan jenis kelamin responden. Responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 26 responden (52%) dan jumlah jenis kelamin perempuan 24 responden (48%).

Tabel 4.3
Kategori Responden

Responden Berdasarkan Kategori Pegawai BPKAD	Total	Persentase (%)
Kepala BPKAD	1	2%
Sekretariat BPKAD	9	18%
Bagian Anggaran	9	18%
Bagian Perbendaharaan	16	32%
Bagian Akuntansi	8	16%
Bagian Aset dan Investasi	7	14%

Sumber : Rekapitulasi Kuisioner

Dari tabel 4.3 di atas menunjukkan jumlah masing-masing responden menurut kategori pegawai BPKAD. Responden dari kategori Kepala BPKAD terdapat 1 responden (2%), Sekretariat BPKAD terdapat 9 responden (18%), Bagian Anggaran terdapat 9 responden (18%), Bagian Perbendaharaan terdapat 16

responden (32%), Bagian Akuntansi terdapat 8 responden (16%) dan kategori Bagian Aset dan Investasi terdapat 7 responden (14%).

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Responden	Total	Persentase (%)
SMA	10	20%
D3	3	6%
S1	25	50%
S2	12	24%

Sumber : Rekapitulasi Kuisioner

Pada tabel 4.4 di atas memberikan informasi latar belakang pendidikan setiap responden. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pada tingkat pendidikan SMA berjumlah 10 responden (20%), tingkat pendidikan D3 berjumlah 3 responden (6%), tingkat pendidikan S1 berjumlah 25 responden (50%) dan tingkat pendidikan S2 berjumlah 12 responden (24%).

Tabel 4.5
Tingkat Usia Responden

Tingkat Usia Responden (Tahun)	Total	Persentase (%)
25 - 35	7	14%
36 - 45	21	42%
46 – 55	13	26%
>55	9	18%

Sumber : Rekapitulasi Kuisioner

Pada tabel 4.5 menunjukkan informasi tingkat usia responden. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa usia 25-35 tahun berjumlah 7 responden (14%), usia 36-45 tahun berjumlah 21 responden (42%), usia 46-55 tahun berjumlah 13 responden (26%) dan usia >55 berjumlah 9 responden (18%).

Tabel 4.6
Lama Bekerja Responden

Lama Bekerja (Tahun)	Total	Persentase (%)
1 - 5	19	38%

6 - 10	24	48%
11 – 15	7	14%

Sumber : Rekapitulasi Kuisioner

Pada tabel 4.6 menunjukkan informasi lama bekerja responden. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa lama bekerja dengan kisaran 1-5 tahun berjumlah 19 responden (38%), lama bekerja dengan kisaran 6-10 tahun berjumlah 24 responden (48%) dan lama bekerja dengan kisaran 11-15 tahun berjumlah 7 responden (14%).

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Pada analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi atau gambaran terkait dengan data yang terdiri dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kortosis dan swekness.

Tabel 4.7
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyajian Laporan Keuangan	50	28	32	30.14	1.414
Aksesibilitas	50	23	33	29.36	1.956
Pengendalian Internal	50	23	33	29.98	1.985
Transparansi Laporan Keuangan	50	27	33	30.04	1.428
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Dari tabel 4.7 di atas menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai rata-rata 30,14 dengan simpangan baku 1,414. Nilai rata-rata variabel aksesibilitas adalah 29,36 dengan simpangan baku 1,956. Nilai rata-rata variabel pengendalian internal adalah 29,98 dengan simpangan baku 1,985. Terakhir ada variabel transparansi laporan keuangan memiliki rata-rata 30,04 dengan simpangan baku 1,428.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau sah tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai korelasi atau r_{hitung} dari variabel penelitian dengan nilai r_{tabel} pada setiap item pertanyaan. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data dapat dikatakan valid.

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

No Item	r_{hitung}	R tabel 5%	Sig	Kriteria
1	0,662	0,279	0,000	Valid
2	0,568	0,279	0,000	Valid
3	0,635	0,279	0,000	Valid
4	0,599	0,279	0,000	Valid
5	0,700	0,279	0,000	Valid

Sumber : Perbandingan nilai

Tabel 4.9
Hasil Uji Validitas Variabel Aksesibilitas

No Item	r hitung	R tabel 5%	Sig	Kriteria
1	0,427	0,279	0,000	Valid
2	0,521	0,279	0,000	Valid
3	0,590	0,279	0,000	Valid
4	0,524	0,279	0,000	Valid
5	0,560	0,279	0,000	Valid
6	0,733	0,279	0,000	Valid
7	0,647	0,279	0,000	Valid

Sumber : Perbandingan nilai

Tabel 4.10
Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Internal

No Item	r hitung	R tabel 5%	Sig	Kriteria
1	0,432	0,279	0,000	Valid
2	0,387	0,279	0,000	Valid
3	0,524	0,279	0,000	Valid

4	0,759	0,279	0,000	Valid
5	0,677	0,279	0,000	Valid
6	0,677	0,279	0,000	Valid
7	0,415	0,279	0,000	Valid

Sumber : Perbandingan nilai

Tabel 4.11
Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Laporan Keuangan

No Item	r hitung	R tabel 5%	Sig	Kriteria
1	0,541	0,279	0,000	Valid
2	0,611	0,279	0,000	Valid
3	0,585	0,279	0,000	Valid
4	0,591	0,279	0,000	Valid
5	0,603	0,279	0,000	Valid
6	0,598	0,279	0,000	Valid

Sumber : Perbandingan nilai

Dari tabel 4.8 tabel 4.9 tabel 4.10 dan tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validitas masing-masing item pernyataan tiap variabel memiliki nilai r_{hitung} yang diperoleh dari perhitungan statistik > nilai $r_{tabel.}$ Oleh karena itu, dapat disimpulkan secara keseluruhan seluruh item variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Pengendalian Internal dan Transparansi Laporan Keuangan sudah valid dan dapat dilanjutkan untuk pengujian lainnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan sebuah pengujian untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau item pernyataan. Teknik statistik yang digunakan untuk pengujian terebut dengan koefisien *cronbach's alpha* setelah dilakukan pengukuran dengan menggunakan SPSS. Suatu kuisioner dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha* > 0,60.

Tabel 4.12
Hasil Uji Reabilitas Variabel Penyajian Laporan Keuangan

Cronbach's Alpha	N of Items
0,627	5

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Tabel 4.13
Hasil Uji Reabilitas Variabel Aksesibilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
0,660	7

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Tabel 4.14
Hasil Uji Reabilitas Variabel Pengendalian Internal

Cronbach's Alpha	N of Items
0,633	7

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Tabel 4.15
Hasil Uji Reabilitas Variabel Transparansi Laporan Keuangan

Cronbach's Alpha	N of Items
0,620	6

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Dari tabel 4.12, tabel 4.13, tabel 4.14 dan tabel 4.15 menunjukkan hasil masing-masing sebagai berikut. Pertama, tabel 4.12 diperoleh nilai 0,627 > 0,60. Kedua tabel 4.13 diperoleh nilai 0,660 > 0,60. Ketiga tabel 4.14 diperoleh nilai 0,636 > 0,60. Dan yang Keempat tabel 4.15 diperoleh nilai 0,620 > 0,60. Oleh karena itu, per item dalam kuisioner sudah teruji reliabilitasnya untuk membentuk variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, pengendalian internal dan transparansi laporan keuangan serta dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

Suatu regresi dengan menggunakan metode estimasi *Ordinary Least Squares* (OLS) akan memberikan hasil yang *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) jika memenuhi semua asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal maka harus di uji normalitas. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidaknya yaitu dengan menggunakan analisis statistik menggunakan uji statistik non parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan bantuan aplikasi software statistik SPSS v.26.0. Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan dalam penelitian ini:

Tabel 4.16
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.19788036
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.068
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Dari tabel 4.16 di atas menunjukkan hasil uji statistic non parametik *Kolmogorov-Smirnov*. Dari nilai yang ditunjukkan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh data pada pengujian ini sudah berdistribusi

normal. Hal ini bisa dibuktikan dari nilai dan signifikan variabel > nilai Alpha (0,05). Di mana nilai dan signifikan variabel yaitu 0,2 > 0,05.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk membuktikannya, peneliti menggunakan cara dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nantinya model regresi dinyatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai *Tolerance* ≥ 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) ≤ dari 10.

Tabel 4.17
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.410	5.833		.756	.454		
	Penyajian Laporan Keuangan	.608	.128	.533	4.738	.000	.888	1.126
	Aksesibilitas	-.145	.094	-.171	-1.553	.127	.932	1.073
	Pengendalian Internal	.421	.094	.501	4.480	.000	.899	1.113
a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan								

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Pada tabel 4.17 terlihat hasil yang diperoleh dari ketiga variabel (Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal) adalah tidak ditemukan adanya multikolinearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai *Tolerance* setiap variabel > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Dimana nilai *Tolerance* masing-masing variabel adalah penyajian laporan keuangan 0,888, aksesibilitas 0,932 dan pengendalian internal 0,899. Sedangkan nilai VIF-nya masing-masing adalah penyajian laporan keuangan 1,126, aksesibilitas 1,073 dan pengendalian internal 1,113.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini, pengujian juga dilakukan terhadap model regresi dengan menggunakan Uji Gletser. Pada metode pengujian ini mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika nilai signifikan setiap variabel > nilai Alpha (0,05), maka dalam model regresi, variansnya bersifat homogen.

Tabel 4.18
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.108	3.349		-.928	.358
	Penyajian Laporan Keuangan	.062	.068	.135	.906	.370
	Aksesibilitas	.031	.050	.095	.632	.530
	Pengendalian Internal	.037	.048	.114	.771	.445
a. Dependent Variable: Abs_Res						

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Pada tabel 4.16 terlihat bahwa hasil regresi dari variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap nilai *absolute residual*. Nilai signifikan setiap variabel dari pengujian ini > nilai Alpha (0,05) dimana masing-masing dari nilai signifikansinya yaitu penyajian laporan keuangan 0,370, aksesibilitas 0,530 dan pengendalian internal 0,445. Dengan demikian, model regresi ini pastinya sudah bebas dari heteroskedastisitas. Dengan kata lain, variansnya residualnya bersifat sama (homogen).

4. Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji regresi untuk menguji hipotesis-hipotesisnya. Adapun uji regresi yang dilakukan adalah uji

regresi linear berganda, yaitu untuk menguji variabel-variabel independen yang lebih dari satu terhadap variabel dependen. Regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1,2,3 dan 4 yang telah diajukan pada bab sebelumnya.

Tabel 4.19
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.410	5.833		.756	.454
	X1	.608	.128	.533	4.738	.000
	X2	-.145	.094	-.171	-1.553	.127
	X3	.421	.094	.501	4.480	.000
a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan						

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Berdasarkan dari hasil tabel 4.19 rumus regresi pada penelitian ini adalah:

$$Y= 4.410 + 0,608\ X_1 – 0,145\ X_2 + 0,421\ X3 + e$$

Dalam hal ini adalah :

a = Konstanta

X_1 = Penyajian Laporan Keuangan

X_2 = Aksesibilitas

X_3 = Pengendalian Internal

Y = Transparansi Laporan Keuangan

b1, b2 = Koefisien regresi untuk X_1, X_2 dan X_3

e = Faktor gangguan

Persamaan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berkut:

a. Konstanta bernilai sebesar 4.410 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan. Angka tersebut bernilai positif, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang positif terhadap transparansi laporan keuangan.

b. Koefisien regresi penyajian laporan keuangan sebesar 0,608 dan bernilai positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan efisiensi penyajian laporan keuangan sebanyak 1% maka transparansi laporan keuangan meningkat sebesar 60,8%.
c. Koefisien regresi aksesibilitas sebesar 0,145 dan bernilai negatif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi penurunan efisiensi aksesibilitas sebanyak 1% maka transparansi laporan keuangan menurun sebesar 14,5%.
d. Koefisien regresi pengendalian internal sebesar 0,421 dan bernilai positif. Hal ini menggambarkan bahwa jika terjadi kenaikan efisiensi pengendalian internal sebanyak 1% maka transparansi laporan keuangan meningkat sebesar 42,1%

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik dapat dilihat pada tabel *coefficient* (β) yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t statistik pun dibutuhkan untuk menguji seberapa besar variabel bebas yakni penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan. Nilai t_{tabel} diperoleh dengan k = 3, n = 50 sehingga t_{tabel} = (α/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 46) = 2,01290.

Tabel 4.20
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.410	5.833		.756	.454
	X1	.608	.128	.533	4.738	.000
	X2	-.145	.094	-.171	-1.553	.127
	X3	.421	.094	.501	4.480	.000
a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan						

Sumber : Output SPSS.v.26.0

1) Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan

   Hasil koefisien t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan (X_1) mempunyai t_{hitung} sebesar 4,738 lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 2,01290 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0^1 ditolak dan H_a^1 diterima, dimana penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

2) Pengaruh Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan

   Hasil koefisien t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas (X_2) mempunyai t_{hitung} sebesar -1,553 lebih kecil dibandingkan t_{tabel} sebesar 2,01290 dengan tingkat signifikan 0,127 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0^2 diterima dan H_a^2 ditolak, dimana aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

3) Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan

   Hasil koefisien t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal (X_3) mempunyai t_{hitung} sebesar 4,480 lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 2,01290 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0^3 ditolak dan H_a^3 diterima, dimana pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan.

4) Berdasarkan hasil uji parsial di atas menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan pengendalian internal memberikan pengaruh lebih besar terhadap transparansi laporan keuangan sedangkan aksesibilitas tidak memberikan pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan

b. Uji Simultan (F)

Uji F statistik bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengaruhnya pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara membandingkan besar nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F_{tabel} diperoleh dengan k = 3, n = 50 sehingga F_{tabel} = (k ; n-k) = F(3 ; 47) = 2,80.

Tabel 4.21
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65.709	3	21.903	14.330	.000[b]
	Residual	70.311	46	1.528		
	Total	136.020	49			
a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas						

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Dari hasil perhitungan pada tabel 4.21 dapat dilihat bahwa nilai signifikan adalah 0,000 dan nilah F_{hitung} 14,330. Dasar pengambilan keputusan adalah tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sebesar 14,330 > 2,80, maka dengan itu H_o^4 ditolak dan H_a^4 diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan efisiensi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal secara bersama-sama mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefiisen determinasi dilakukan untuk menemukan besarnya tingkat kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

perubahan variabel dependen. Angka yang menjadi acuan koefisien determinasi adalah nilai R Square.

Tabel 4.22
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695[a]	.483	.449	1.236
a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas				

Sumber : Output SPSS.v.26.0

Pada tabel 4.22 menunjukkan bahwa R Square sebesar 0,483. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 48,3% transparansi laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal. Sedangkan sisanya sebesar 51,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan hasil penelitian yang telah diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil pembahasan lebih mendalam akan diuraikan dalam poin-poin berikut ini:

a. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan koefisien 4,738. Hal ini berarti penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan yang artinya bahwa semakin besar tingkat penyajian laporan keuangan maka nilai transparansi laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang sudah di bahas di Bab II yaitu penyajian laporan keuangan hal yang sangat penting, karena adanya pengungkapan atas informasi di dalam laporan keuangan yang merupakan

alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk menyajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Sehingga dalam menyajikan laporan keuangan suatu instansi yang dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maka akan terciptanya tujuan suatu pemerintah untuk memberikan informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga dalam menyajikan laporan keuangan secara transparansi.

b. Pengaruh Aksesibilitas terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan variabel aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan dengan nilai signifikan 0,127 > 0,05 dan koefisien -1,553. Dapat diartikan bahwa aksesibilitas tidak memberikan pengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena aksesibilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan tidak dilakukan dan masih kurang efektif dalam mempublikasi laporan keuangan melalui surat kabar, radio stasiun televisi, internet ataupun website serta belum menjadi hal yang umum untuk dilaksanakan.

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang sudah di bahas di Bab II yaitu aksesibilitas mempunyai peran yang sangat penting, karena merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik yang transparan. Aksesibilitas dalam laporan keuangan dilakukan agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Akan tetapi, berbeda dengan Pemerintah Kota Medan, sangat minim untuk dilakukannya akses publik kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin

tinggi aksesibilitas maka semakin rendah tingkat aksesibilitas maka menghasil pengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan.

c. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai signifikan variabel pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan adalah 0,000 < 0,05 dengan koefisien 4,480. Hal ini berarti pengendalian internal memberikan pengaruh signifikan terhadap transparansi laporan keuangan yang artinya bahwa semakin besar tingkat pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan baik maka nilai transparansi laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula.

Penelitian ini sesuai dengan teori yang sudah di bahas di Bab II bahwa pengendalian internal merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas dengan tujuan untuk memantau apakah kegiatan operasional maupun finansial perusahaan telah berjalan sesuai prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen dan juga mempunyai peran penting dalam transparansi laporan keuangan daerah. Dengan singkatnya, semakin baik pengendalian internal maka akan semakin baik transparansi dalam suatu instansi atau entitas tersebut.

d. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan

Dari hasil penelitian ini, secara simultan dapat dilihat pada tabel 4.21 bahwa variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Diketahui bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} sebesar 14,330 > 2,80 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama efisiensi penyajian laporan

keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan uji Koefisien Determinasi pada tabel 4.22 diperoleh hasil nilai R^2 sebesar 0,483 atau 48,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 48,3% transparansi laporan keuangan dipengaruhi oleh variasi dari variabel independen yaitu efisiensi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal. Sedangkan sisanya sebesar 51,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil pengujian di atas, hal ini sesuai dengan teori yang sudah di bahas di Bab II bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan adalah pengendalian internal, aksesibilitas, pengendalian internal, tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan dan komitmen manajemen. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan di atas, terdapat beberapa variabel di dalam penelitian ini. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan suatu pemerintah daerah akan semakin tinggi apabila secara bersama-sama efisiensi penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.
2. Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas memiliki arah hubungan yang negatif terhadap transparansi laporan keuangan.
3. Pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan.
4. Penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal secara simultan mempengaruhi transparansi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan pengendalian internal secara bersama-sama mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Dalam menyajikan laporan keuangan diharapkan Pemerintah Kota Medan dapat melakukan lebih efisiensi lagi sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipercaya dan sesuai dengan standard yang berlaku yang bertujuan

untuk memberikan informasi keuangan suatu pemerintah daerah, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu.

2. Pemerintah Kota Medan diharapkan lebih mengoptimalkan dan meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan secara publik sehingga memberikan dampak baik terhadap pengguna laporan keuangan. Dengan begitu memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui keputusan yang diambil di dalam laporan keuangan.
3. Pemerintah Kota Medan diharapkan lebih memaksimalkan dan meningkatkan pengendalian internal dalam memantau kegiatan operasional maupun finansial sehingga terciptanya pengamanan aset serta menjamin ketaatan dan kepatuhan setiap instansi terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan pertimbangan selanjutnya dengan data dan sampel dengan rentan waktu yang lebih panjang dari penelitian ini. Kemudian juga perlu adanya penelitian lanjutan yang mengungkap faktor-faktor lain yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfurkaniati, et. al. *Pengantar Akuntansi*, Medan: Madenatera, 2016.

Ariawaty, Rina Novianty, et. al. *Metode Kuantitatif Praktis*, Bandung: PT. Bima Pratama Sejahtera, 2018.

Ayu Tri Wintari, Komang. "*Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan*", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol . 22, 2018.

Ayu Indria, Nabila. "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011.

Dora, Sofia. "*Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKD Kota Medan)*", Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, 2014.

Enre, Deby Tamara. "*Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*", Skripsi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Hamid, Farid dan Heri Budianto. *Ilmu Komunikasi: Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Harahap, Muhammad Ikhsan, et.al. "*Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening*", Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Vol. 5 No. 2, 2013.

Hastuti, Arum Indri. 2015. "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Buyolali*", Skripsi, Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hehanussa, Salomi J. 2015. "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi*

Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Vol. 2 No. 2.

Hery. *Auditing dan Asurans*, Jakarta: PT Grasindo, 2016.

_____. *Akuntansi Keuangan Menengah I*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

_____.*Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

_____.*Teori Akuntansi*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ikhsan, Arfan, et. al. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

_____.*Analisa Laporan Keuangan*, Medan: Madenatera, 2018.

Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Khaerany, Rizky, et al. *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Universitas Hasanuddin, 2015.

Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Dharma Art, 2015.

Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.

Mulyono, Imam. 2013. "*Aksesibilitas Laporan keuangan Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Di Internet*", Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Malang.

Nasution, Yenni Samri Juliati, et. al. *Hadis-hadis Ekonomi*, Medan: Kencana, 2017.

Nordiawan, Dedi dan Ayuningtyas Hertanti. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Pemerintah Kota Medan. "Opini Audit Pemerintah Kota Medan", diakses dari http://pemkomedan.go.id, pada tanggal 21 Februari 2020.

PemkoMedan, BPKAD."Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Medan", diakses dari http://bpkad.pemkomedan.go.id/statis-2-visidanmisi.html, pada September 2020.

Prihasmoro, Hardianto. *Ringkasan Kitab Hadist Shahih Imam Muslim*, Jakarta: Jamal Al-Nasir, 2007.

Purwaningrum, Septa. "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo*", Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponogoro, 2018

Renyowijoyo, Muindro. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*, Jakarta: Mitra Wacana Media , 2010.

_____.*Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media , 2010.

Sande, Peggy. "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)*". Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, 2013.

Sani, Achmad dan Masyhuri Machfudz. *Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 199

Shafratunnisa, Fierda. "*Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*", Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Sinulingga dan Sukaria. *Metodologi Penelitian*, Medan: USU Press, 2015

Sulianto. *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: CV. Ande Offset, 2006

Sujarweni, V. Wiratna Sujarweni. *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.

_____.*SPSS untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014

Syafina, Laylan. *Panduan Penelitian Kualitatif Akuntansi*, Medan: Febi Press UINSU, 2018

Syaifullah, Wildan Andika. "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris pada Badan dan Dinas yang tergabung dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo)*", Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016.

Tambunan, Siti Kemala Sari. "*Pengaruh Kualitas Informasi Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan*". Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area, 2018.

Tarigan, Azhari Akmal. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press, 2011.

Timotius, Kris H. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2017.

Tim Penyusun. *Standar Akuntansi Pemerintah: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005*, Bandung: Fokus Media, 2009.

Tunggal, Amin Widjaja. *Struktur Pengendalian Intern*, Jakarta: PT Renika Cipta, 1995.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008

Widya Sari, Embun. "*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu*", Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru Vol. 4 No. 1, 2017.

Yuliani, Nur Laila. "*Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*". Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 24 No. 1, Universitas Muhammadiyah Magelang: 1-14, 2017.

LAMPIRAN I

KUISIONER PENELITIAN

PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari agar sudi kiranya memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. Informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan merupakan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian skripsi saya. Dan saya menjamin serta bertanggung jawab atas informasi yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan adalah untuk kepentingan akademis semata. Atas bantuan dan perhatian yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari berikan, saya ucapkan terima kasih.

(Befiriana Moniza)

Petunjuk Pengisian

Cara pengisian kuesioner ini adalah dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Bapak/Ibu/Saudara/Saudari cukup memberikan tanda centang (∨) pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu : SS, S, N, TS, dan STS. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Skor 1= Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2= Tidak Setuju (TS)

Skor 3= Kurang Setuju (KS)

Skor 4= Setuju (S)

Skor 5= Sangat Setuju (SS)

IDENTITAS RESPONDEN

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Identitas Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, mohon dilengkapi dengan mengisititik-titik dan memberi tanda silang pada pilihan jawaban yang tersedia.

Nama Responden : ……

Umur Responden : …….. Tahun

Jenis kelamin : ……

Pekerjaan : ……

Jabatan : ……

Lama menduduki jabatan ini : …….. Tahun

Pendidikan terakhir : ☐ SMU ☐ D3

☐ S1 ☐ S2

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER

1. Penyajian Laporan Keuangan

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (*feedback value*)					
2	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan dating (*predictive value*)					
3	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.					
4	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.					

2. Aksesibilitas

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Laporan keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media masa.					
2	Memberikan kemudahan kepada para pengguna laporan keuangan dalam memperoleh informasi keuangan tentang laporan keuangan daerah					
3	Masyarakat dapat mengakses laporan keuangan daerah melalui internet (website)					
4	Laporan keuangan mudah diakses dimana pun					
5	Laporan keuangan memuat informasi yang sudah harusnya terpublikasi					
6	Seluruh pengguna memiliki kemudahan yang sama dalam mengakses laporan keuangan					
7	Laporan keuangan daerah tidak dapat diakses melalui media massa dan internet					

3. Pengendalian Internal

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Pemerintah daerah memiliki struktur organisasi dan job deskripsi yang jelas					
2	Adanya kejelasan tugas dan wewenang dalam pemerintah daerah					
3	Auditor mengetahui proses penilaian risiko yang dilakukan manajemen					
4	Selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, dan barang					
5	Adanya otorisasi yang jelas atas aktivitas transaksi					

	serta mengimplementasikan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.					
6	Pemerintah mendapatkan informasi yang relevan serta berkualitas untuk mendukung pengendalian internal.					
7	Komunikasi telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif mengenai pengendalian internal untuk mendukung komponen lainnya.					

4. Transparansi Laporan Keuangan

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	APBD disusun dengan pendekatan kinerja					
2	Pelaporan keuangan daerah dibuat dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah					
3	Terdapat sistem untuk menyampaikan kritik dan saran					
4	Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai pemerintah					
5	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah melalui media masa.					
6	Pengelolaan APBD dipertanggung jawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi dan kepada masyarakat luas					
7	Adanya kerja sama dengan media masa dan lembaga pemerintahan dalam peningkatan informasi					

LAMPIRAN II

HASIL JAWABAN RESPONDEN

1. Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

No	Nama	Nilai Jawaban Kuisioner					Jumlah
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	
1.	T. Ahmad Sofyan, SE.Ak, MM	5	4	5	4	5	23
2.	Ir. Sulfan Nasution	5	5	4	5	5	24
3.	Zulfahanim Nasution	4	4	5	4	4	21
4.	Syahrun Harahap, SE	4	4	4	4	4	20
5.	Aswita Agustini S, S.Sos	4	4	4	4	4	20
6.	Renny Elisabeth Sagala, SE	4	4	5	5	5	23
7.	Nurliana E.Agustina Harahap	4	4	4	4	4	20
8.	Zulkifli, S.Pd, M.Si	4	5	4	4	5	22
9.	Parmin, A.Md	4	4	4	4	5	21
10.	Sutan Arsyad, A.Md	4	4	4	5	4	21
11.	Syahrial Rangkuti, SE	5	4	5	4	4	22
12.	Erlina Riz	4	4	5	4	4	21
13.	Halim Hasibuan, S.Sos	4	5	4	4	5	22
14.	Edy Surya, SE	4	5	4	5	4	22
15.	Ivaldo Fadhillah, SE	4	5	4	4	4	21
16.	Reo Andesto	4	4	5	5	4	22
17.	Andy Syahputra Nasution, SE	4	4	4	4	4	20
18.	Andriana, SE, M.Si	4	4	4	4	5	21
19.	Fitriana, S.Kom	5	4	5	4	5	23
20.	Sanusi Harahap, S.Sos	5	4	5	4	4	22
21.	Gonsul	4	4	4	4	4	20
22.	Ridha Afani Hasibuan, SE	4	4	5	5	4	22

23.	Mara Halim Harahap, S.Kom	4	5	4	4	5	22
24.	Yuniati Gea, SE	5	4	5	4	5	23
25.	Yusmaniar, SE	4	4	4	4	4	20
26.	Sri Maimun	4	4	4	4	4	20
27.	Nurhamidah	4	4	4	5	4	21
28.	Meyli Khoirunnisa Rangkuti, SE	4	4	4	5	5	22
29.	Rolan Abonia,SE, M.Si	4	4	4	4	4	20
30.	Silvana Rahma Lubis, S.Sos.I	4	5	5	4	5	23
31.	Grata Manatap Sinaga, SE, MAP	4	5	5	4	4	22
32.	Irwani Simanjuntak, S.I.P	4	4	5	5	5	23
33.	Henrico V Nainggolan, SH	4	4	4	4	5	21
34.	Daniel Syafriatna, A.Md	5	4	5	5	5	24
35.	Eliyani	4	4	4	4	4	20
36.	Drs. Mhd Ashari Lubis, SE, M.Si	4	4	4	4	4	20
37.	Mhd Sayuti Harahap, SE, MM	4	4	4	4	4	20
38.	Titin Herawati	4	4	5	4	4	21
39.	Dedy Syahputra, SE	5	4	4	4	4	21
40.	Siti Qamarullaily Harahap	5	4	4	4	4	21
41.	Dewi Laura Simanjuntak	5	5	5	4	4	23
42.	Risuhendi, SE, M.Si, Ak, CA	5	5	5	5	5	25
43.	Adli Wardhana Prawira, SE	4	4	5	4	4	21
44.	Sumiadi, SS	4	4	4	4	4	20
45.	Marisa Sherly Mutiara, SE, MAP	4	4	4	4	4	20
46.	Khoirullah, SE	4	4	4	4	4	20
47.	Chairulsyah	4	4	5	4	4	21
48.	Hendrik Iskandar, SH, M.AP	5	5	5	5	5	25
49.	Haryan Eka Putra Nst, S.Kom	5	5	5	5	5	25
50	Eva Lucia BR Simamora, SE	5	4	4	5	5	31

2. Aksesibilitas (X_2)

No	Nama	Nilai Jawaban Kuisioner							Jumlah
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
1.	T. Ahmad Sofyan, SE.Ak, MM	4	4	4	4	4	5	5	30
2.	Ir. Sulfan Nasution	4	4	4	4	4	4	4	28
3.	Zulfahanim Nasution	4	4	4	4	4	4	4	28
4.	Syahrun Harahap, SE	5	5	4	4	4	4	5	31
5.	Aswita Agustini S, S.Sos	4	5	5	5	4	4	5	32
6.	Renny Elisabeth Sagala, SE	4	3	4	4	3	3	2	23
7.	Nurliana E.Agustina Harahap	4	4	4	5	5	4	5	31
8.	Zulkifli, S.Pd, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	28
9.	Parmin, A.Md	4	4	4	4	4	4	5	29
10.	Sutan Arsyad, A.Md	5	5	5	5	4	5	4	33
11.	Syahrial Rangkuti, SE	5	4	5	5	4	5	4	32
12.	Erlina Riz	4	5	4	5	5	5	4	32
13.	Halim Hasibuan, S.Sos	4	5	4	4	4	4	4	29
14.	Edy Surya, SE	5	5	5	4	4	4	4	31
15.	Ivaldo Fadhillah, SE	4	4	4	4	5	4	5	30
16.	Reo Andesto	4	4	4	5	5	5	5	32
17.	Andy Syahputra Nasution, SE	4	4	4	4	4	4	4	28
18.	Andriana, SE, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	28
19.	Fitriana, S.Kom	4	4	5	5	4	4	5	31
20.	Sanusi Harahap, S.Sos	4	5	4	4	4	4	4	29
21.	Gonsul	5	4	4	5	4	4	4	30
22.	Ridha Afani Hasibuan, SE	4	4	4	4	5	4	4	29
23.	Mara Halim Harahap, S.Kom	4	5	4	4	4	5	4	30
24.	Yuniati Gea, SE	4	4	3	4	3	2	3	23
25.	Yusmaniar, SE	4	4	4	4	4	4	4	28

26.	Sri Maimun	5	4	4	4	4	4	4	29
27.	Nurhamidah	3	4	4	4	4	4	4	27
28.	Meyli Khoirunnisa Rangkuti, SE	4	4	4	5	5	4	4	30
29.	Rolan Abonia,SE, M.Si	5	5	5	5	4	4	4	32
30.	Silvana Rahma Lubis, S.Sos.I	4	4	5	5	4	4	4	30
31.	Grata Manatap Sinaga, SE, MAP	5	4	4	4	4	4	4	29
32.	Irwani Simanjuntak, S.I.P	4	4	4	4	4	4	4	28
33.	Henrico V Nainggolan, SH	4	5	4	4	5	4	4	30
34.	Daniel Syafriatna, A.Md	4	4	5	4	5	4	5	31
35.	Eliyani	4	4	4	4	4	4	5	29
36.	Drs. Mhd Ashari Lubis, SE, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	28
37.	Mhd Sayuti Harahap, SE, MM	4	5	4	4	4	4	4	29
38.	Titin Herawati	4	4	4	4	4	3	4	27
39.	Dedy Syahputra, SE	5	4	4	4	4	5	5	31
40.	Siti Qamarullaily Harahap	4	4	5	4	4	4	4	29
41.	Dewi Laura Simanjuntak	4	4	4	4	4	4	5	29
42.	Risuhendi, SE, M.Si, Ak, CA	4	4	4	5	4	4	4	29
43.	Adli Wardhana Prawira, SE	4	4	4	4	4	4	4	28
44.	Sumiadi, SS	5	5	4	4	4	4	4	30
45.	Marisa Sherly Mutiara, SE, MAP	5	5	4	4	4	4	5	31
46.	Khoirullah, SE	5	4	4	4	5	4	4	30
47.	Chairulsyah	4	4	4	4	4	4	4	28
48.	Hendrik Iskandar, SH, M.AP	4	5	4	4	4	4	5	30
49.	Haryan Eka Putra Nst, S.Kom	4	4	5	4	5	4	5	31
50	Eva Lucia BR Simamora, SE	4	4	4	4	4	4	4	28

3. Pengendalian Internal (X_3)

No	Nama	Nilai Jawaban Kuisioner							Jumlah
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	
1.	T. Ahmad Sofyan, SE.Ak, MM	5	4	4	4	4	4	4	29
2.	Ir. Sulfan Nasution	4	4	4	5	5	4	4	30
3.	Zulfahanim Nasution	4	5	4	5	5	5	5	33
4.	Syahrun Harahap, SE	4	4	4	4	5	4	4	29
5.	Aswita Agustini S, S.Sos	5	4	4	4	4	5	4	30
6.	Renny Elisabeth Sagala, SE	4	4	4	4	4	4	4	28
7.	Nurliana E.Agustina Harahap	4	4	5	4	5	4	5	31
8.	Zulkifli, S.Pd, M.Si	4	5	4	5	5	5	4	32
9.	Parmin, A.Md	5	4	5	4	4	4	5	31
10.	Sutan Arsyad, A.Md	4	4	4	4	4	4	4	28
11.	Syahrial Rangkuti, SE	4	4	3	3	2	3	4	23
12.	Erlina Riz	5	4	4	5	4	4	4	30
13.	Halim Hasibuan, S.Sos	5	4	5	4	5	4	4	31
14.	Edy Surya, SE	4	5	4	4	4	4	4	29
15.	Ivaldo Fadhillah, SE	4	4	4	4	4	4	4	28
16.	Reo Andesto	4	5	4	5	5	4	4	31
17.	Andy Syahputra Nasution, SE	4	4	4	5	5	5	5	32
18.	Andriana, SE, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	28
19.	Fitriana, S.Kom	4	4	4	4	4	4	3	27
20.	Sanusi Harahap, S.Sos	5	4	5	5	4	4	4	31
21.	Gonsul	5	5	5	5	4	4	5	33
22.	Ridha Afani Hasibuan, SE	5	4	5	4	4	4	4	30
23.	Mara Halim Harahap, S.Kom	5	5	5	5	5	4	4	33
24.	Yuniati Gea, SE	4	4	4	4	5	5	4	30
25.	Yusmaniar, SE	4	4	4	4	4	4	4	28

26.	Sri Maimun	4	4	4	4	4	3	4	27
27.	Nurhamidah	5	4	4	5	5	5	5	33
28.	Meyli Khoirunnisa Rangkuti, SE	5	4	4	4	4	4	4	29
29.	Rolan Abonia,SE, M.Si	5	4	4	4	4	4	5	30
30.	Silvana Rahma Lubis, S.Sos.I	4	4	4	4	4	3	4	27
31.	Grata Manatap Sinaga, SE, MAP	4	5	4	4	5	5	4	31
32.	Irwani Simanjuntak, S.I.P	4	5	4	4	4	4	4	29
33.	Henrico V Nainggolan, SH	4	4	4	4	4	4	5	29
34.	Daniel Syafriatna, A.Md	4	4	4	4	5	4	5	30
35.	Eliyani	4	4	4	4	5	5	4	30
36.	Drs. Mhd Ashari Lubis, SE, M.Si	4	5	5	4	4	5	4	31
37.	Mhd Sayuti Harahap, SE, MM	5	5	5	5	4	5	4	33
38.	Titin Herawati	4	4	4	5	5	4	4	30
39.	Dedy Syahputra, SE	5	4	5	4	4	4	4	30
40.	Siti Qamarullaily Harahap	5	4	4	4	5	4	5	31
41.	Dewi Laura Simanjuntak	4	5	5	5	4	5	4	32
42.	Risuhendi, SE, M.Si, Ak, CA	4	4	5	4	4	4	4	29
43.	Adli Wardhana Prawira, SE	4	4	4	4	4	4	4	28
44.	Sumiadi, SS	4	5	4	4	4	4	4	29
45.	Marisa Sherly Mutiara, SE, MAP	4	4	5	5	5	5	4	32
46.	Khoirullah, SE	5	4	4	5	5	5	5	33
47.	Chairulsyah	5	4	5	5	5	4	4	32
48.	Hendrik Iskandar, SH, M.AP	5	4	4	4	5	4	5	31
49.	Haryan Eka Putra Nst, S.Kom	4	4	4	4	4	4	5	29
50	Eva Lucia BR Simamora, SE	4	4	5	4	4	4	4	29

4. Transparansi Laporan Keuangan (Y)

No	Nama	Nilai Jawaban Kuisioner						Jumlah
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	
1.	T. Ahmad Sofyan, SE.Ak, MM	4	4	5	4	4	5	26
2.	Ir. Sulfan Nasution	5	5	4	4	4	4	26
3.	Zulfahanim Nasution	4	5	4	5	5	5	28
4.	Syahrun Harahap, SE	4	4	4	4	4	4	24
5.	Aswita Agustini S, S.Sos	5	4	4	4	4	4	25
6.	Renny Elisabeth Sagala, SE	4	4	4	5	4	5	26
7.	Nurliana E.Agustina Harahap	4	4	4	5	4	4	25
8.	Zulkifli, S.Pd, M.Si	5	4	5	4	5	4	27
9.	Parmin, A.Md	4	4	4	4	4	5	25
10.	Sutan Arsyad, A.Md	4	4	4	4	4	4	24
11.	Syahrial Rangkuti, SE	4	4	4	3	4	4	23
12.	Erlina Riz	5	4	4	4	5	4	26
13.	Halim Hasibuan, S.Sos	4	4	5	4	4	4	25
14.	Edy Surya, SE	4	5	5	4	5	4	27
15.	Ivaldo Fadhillah, SE	4	5	4	4	4	4	25
16.	Reo Andesto	4	4	4	5	4	4	25
17.	Andy Syahputra Nasution, SE	5	4	4	4	4	5	26
18.	Andriana, SE, M.Si	5	4	4	4	4	5	26
19.	Fitriana, S.Kom	4	4	4	5	4	4	25
20.	Sanusi Harahap, S.Sos	4	5	5	4	4	5	27
21.	Gonsul	5	5	4	5	4	4	27
22.	Ridha Afani Hasibuan, SE	4	4	4	4	5	4	25
23.	Mara Halim Harahap, S.Kom	5	4	5	5	4	4	27
24.	Yuniati Gea, SE	4	4	4	5	5	5	27
25.	Yusmaniar, SE	4	4	4	4	4	4	24

26.	Sri Maimun	4	4	4	4	4	4	24
27.	Nurhamidah	5	5	5	4	4	4	27
28.	Meyli Khoirunnisa Rangkuti, SE	5	4	4	4	5	4	26
29.	Rolan Abonia,SE, M.Si	4	4	4	4	4	4	24
30.	Silvana Rahma Lubis, S.Sos.I	4	4	4	4	4	4	24
31.	Grata Manatap Sinaga, SE, MAP	5	5	4	5	4	5	28
32.	Irwani Simanjuntak, S.I.P	4	4	5	5	4	4	26
33.	Henrico V Nainggolan, SH	5	4	4	4	5	5	27
34.	Daniel Syafriatna, A.Md	4	4	4	4	4	4	24
35.	Eliyani	4	4	4	4	4	4	24
36.	Drs. Mhd Ashari Lubis, SE, M.Si	4	4	4	4	4	4	24
37.	Mhd Sayuti Harahap, SE, MM	4	5	5	4	5	4	27
38.	Titin Herawati	4	5	4	4	4	5	26
39.	Dedy Syahputra, SE	4	4	4	4	4	4	24
40.	Siti Qamarullaily Harahap	5	4	5	4	4	4	26
41.	Dewi Laura Simanjuntak	5	5	4	4	4	5	27
42.	Risuhendi, SE, M.Si, Ak, CA	4	4	5	5	5	5	28
43.	Adli Wardhana Prawira, SE	4	5	4	4	4	5	26
44.	Sumiadi, SS	4	4	4	4	4	4	24
45.	Marisa Sherly Mutiara, SE, MAP	4	4	4	4	4	4	24
46.	Khoirullah, SE	5	4	5	5	4	4	27
47.	Chairulsyah	5	5	5	5	5	5	30
48.	Hendrik Iskandar, SH, M.AP	5	4	4	4	4	4	25
49.	Haryan Eka Putra Nst, S.Kom	5	5	5	5	5	5	30
50	Eva Lucia BR Simamora, SE	5	5	5	5	5	5	30

LAMPIRAN III

A. Uji Validitas

1. Penyajian Laporan Keuangan (X_1)

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	TOTAL
Q1	Pearson Correlation	1	.201	.419**	.168	.315*	.662**
	Sig. (2-tailed)		.162	.002	.242	.026	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Q2	Pearson Correlation	.201	1	.091	.201	.359*	.568**
	Sig. (2-tailed)	.162		.529	.162	.010	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Q3	Pearson Correlation	.419**	.091	1	.235	.206	.635**
	Sig. (2-tailed)	.002	.529		.101	.151	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Q4	Pearson Correlation	.168	.201	.235	1	.315*	.599**
	Sig. (2-tailed)	.242	.162	.101		.026	.000
	N	50	50	50	50	50	50
Q5	Pearson Correlation	.315*	.359*	.206	.315*	1	.700**
	Sig. (2-tailed)	.026	.010	.151	.026		.000
	N	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.662**	.568**	.635**	.599**	.700**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2. Aksesibilitas (X_2)

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	TOTAL
Q1	Pearson Correlation	1	.283*	.203	.138	-.071	.201	.027	.427**
	Sig. (2-tailed)		.046	.158	.338	.622	.162	.854	.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q2	Pearson Correlation	.283*	1	.159	.085	.082	.264	.204	.521**
	Sig. (2-tailed)	.046		.270	.555	.569	.064	.155	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q3	Pearson Correlation	.203	.159	1	.415**	.156	.316*	.224	.590**

	Sig. (2-tailed)	.158	.270		.003	.281	.026	.118	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q4	Pearson Correlation	.138	.085	.415**	1	.210	.303*	.090	.524**
	Sig. (2-tailed)	.338	.555	.003		.143	.032	.536	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q5	Pearson Correlation	-.071	.082	.156	.210	1	.386**	.449**	.560**
	Sig. (2-tailed)	.622	.569	.281	.143		.006	.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q6	Pearson Correlation	.201	.264	.316*	.303*	.386**	1	.424**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.162	.064	.026	.032	.006		.002	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q7	Pearson Correlation	.027	.204	.224	.090	.449**	.424**	1	.647**
	Sig. (2-tailed)	.854	.155	.118	.536	.001	.002		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.427**	.521**	.590**	.524**	.560**	.733**	.647**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Pengendalian Internal (X_3)

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	TOTAL
Q1	Pearson Correlation	1	-.129	.336*	.217	.037	.031	.237	.432**
	Sig. (2-tailed)		.373	.017	.131	.801	.828	.098	.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q2	Pearson Correlation	-.129	1	.156	.318*	.054	.319*	-.087	.387**
	Sig. (2-tailed)	.373		.279	.024	.711	.024	.546	.005
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q3	Pearson Correlation	.336*	.156	1	.309*	.135	.169	-.031	.524**
	Sig. (2-tailed)	.017	.279		.029	.351	.240	.830	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q4	Pearson Correlation	.217	.318*	.309*	1	.514**	.454**	.119	.759**
	Sig. (2-tailed)	.131	.024	.029		.000	.001	.411	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q5	Pearson Correlation	.037	.054	.135	.514**	1	.472**	.264	.677**
	Sig. (2-tailed)	.801	.711	.351	.000		.001	.064	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

Q6	Pearson Correlation	.031	.319*	.169	.454**	.472**	1	.128	.677**
	Sig. (2-tailed)	.828	.024	.240	.001	.001		.375	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
Q7	Pearson Correlation	.237	-.087	-.031	.119	.264	.128	1	.415**
	Sig. (2-tailed)	.098	.546	.830	.411	.064	.375		.003
	N	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.432**	.387**	.524**	.759**	.677**	.677**	.415**	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.005	.000	.000	.000	.000	.003	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Transparansi Laporan Keuangan (Y)

Correlations

		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	TOTAL
Q1	Pearson Correlation	1	.207	.207	.141	.194	.134	.541**
	Sig. (2-tailed)		.150	.150	.329	.178	.354	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Q2	Pearson Correlation	.207	1	.238	.160	.209	.359*	.611**
	Sig. (2-tailed)	.150		.096	.268	.145	.010	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Q3	Pearson Correlation	.207	.238	1	.249	.308*	.083	.585**
	Sig. (2-tailed)	.150	.096		.082	.029	.567	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Q4	Pearson Correlation	.141	.160	.249	1	.219	.278	.591**
	Sig. (2-tailed)	.329	.268	.082		.127	.050	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Q5	Pearson Correlation	.194	.209	.308*	.219	1	.248	.603**
	Sig. (2-tailed)	.178	.145	.029	.127		.082	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
Q6	Pearson Correlation	.134	.359*	.083	.278	.248	1	.598**
	Sig. (2-tailed)	.354	.010	.567	.050	.082		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.541**	.611**	.585**	.591**	.603**	.598**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

B. Uji Reabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.627	5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.660	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.636	7

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.620	6

C. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.19788036
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.068
Test Statistic		.093
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

D. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)	4.410	5.833		.756	.454		
	Penyajian Laporan Keuangan	.608	.128	.533	4.738	.000	.888	1.126
	Aksesibilitas	-.145	.094	-.171	-1.553	.127	.932	1.073
	Pengendalian Internal	.421	.094	.501	4.480	.000	.899	1.113

a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan

E. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3.108	3.349		-.928	.358
	Penyajian Laporan Keuangan	.062	.068	.135	.906	.370
	Aksesibilitas	.031	.050	.095	.632	.530
	Pengendalian Internal	.037	.048	.114	.771	.445

a. Dependent Variable: Abs_Res

F. Uji Parsial (Uji t)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.410	5.833		.756	.454
	X1	.608	.128	.533	4.738	.000
	X2	-.145	.094	-.171	-1.553	.127
	X3	.421	.094	.501	4.480	.000

a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan

G. Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65.709	3	21.903	14.330	.000[b]
	Residual	70.311	46	1.528		
	Total	136.020	49			

a. Dependent Variable: Transparansi Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas

H. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.695[a]	.483	.449	1.236

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas

LAMPIRAN IV

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1989/EB.I/KS.02/06/2020 04 Agustus 2020
Lampiran : -
Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	**: Befiriana Moniza**
NIM	**: 0502162138**
Tempat/Tanggal Lahir	**: Medan, 30 April 1999**
Program Studi	**: Akuntansi Syariah**
Semester	**: VIII (Delapan)**
Alamat	**: Jl. Purwosari Gg. Sederhana no 45 Medan Kelurahan PULO BRAYAN BENGKEL Kecamatan MEDAN TIMUR**

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

Medan, 04 Agustus 2020
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Digitally Signed

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag
NIP. 197604232003121002

Tembusan:
- **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan**

info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/897 /Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nomor: B-1989/EB.I/KS.02/06/2020 Tanggal: 04 Agustus 2020 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	:	**Befiriana Moniza.**
NIM	:	0502162138.
Prodi	:	Akuntansi Syariah.
Lokasi	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul	:	"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan".
Lamanya	:	2 (Dua) Minggu.
Penanggung Jawab	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. *Hasil* penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.
Pada Tanggal : 06 Agustus 2020

An.KEPALA BALITBANG KOTA MEDAN
SEKRETARIS,

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Drs. SITI MAHRANI HASIBUAN
PEMBINA Tk. I
NIP. 19661208 198603 2 002

Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Yang Bersangkutan.
5. Pertinggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Befiriana Moniza
2. Nim : 0502162138
3. Tempat / Tgl Lahir : Medan, 30 April 1999
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Alamat : Jalan Purwosari Gg Sederhana No. 45

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 060871 Medan Berijazah Tahun 2010
2. Tamatan SMP Negeri 11 Medan Berijazah Tahun 2013
3. Tamatan SMA Negeri 18 Medan Berijazah Tahun 2016

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Tahun 2009-2010 Anggota Sanggar Tari SD Negeri 060871.
2. Tahun 2012-2013 Anggota Paduan Suara dan Musik SMP Negeri 11 Medan.
3. Tahun 2014-2015 Bendahara Osis SMA Negeri 18 Medan.
4. Tahun 2014-2016 Anggota Sanggar Tari SMA Negeri 18 Medan.
5. Tahun 2018-2019 Sekretaris Pengurus Bidang Kewirausahaan HMJ AKS UINSU.
6. Tahun 2019-2020 Anggota Pengurus Bidang Keolahragaan dan Kesenian HMJ AKS UINSU.